



LAPORAN TAHUNAN 2017

Laporan Tahunan 2017

2017
Annual
Reports

Laporan Tahunan 2017

Annual Report 2017

Combine Resource Institution

Penulis/Writer

Lamia Putri Damayanti

Penyumbang bahan/Contributor

Apriliana Susanti

Anton Hadiyanto

Ferdhi F. Putra

Irman Ariadi

Maryani

Muhammad Amrun

Penyunting/Editor

Elanto Wijoyono

Idha Saraswati

Imung Yunardi

Penerjemah/Translator

Hary Prasodo Syafa'atillah

Desain Visual/Visual Designer

Aris Harianto

Tata Letak/Layout Designer

Adji Satria

Foto/Photo

Dokumentasi CRI

Combine Resource Institution

Jalan KH Ali Maksum 183

Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55188

Telp/Fax: 0274-411123

Email: office@combine.or.id

Website: www.combine.or.id

 @combineresourceinstitution

 @combineRI

 @combine_ri

 @combineresourceinstitution

 +6281804389000

Laporan Tahunan 2017

2017
Annual
Reports

Daftar Isi

Table of Contents

Pengantar	1	
Forewords		
I. Advokasi	7	
I. Advocacy		
A. Kampanye Isu	1. Peran media komunitas dalam melawan <i>hoax</i>	
A. Issue Campaign	1. The role of community media in fighting hoax	9
	2. Registrasi kartu simcard dan keamanan data pribadi	
	2. Simcard registration and personal information security	14
	3. Diskusi buku dan pemaparan hasil riset "Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru" bersama pegiat media komunitas	
	3. Book and Research Discussion: "Community Media in the Middle of New Media Wave" with the Activists of Community Media	17
B. Partisipasi dalam Agenda Mitra		
B. Participation in Partner's Agenda	1. Konferensi AMARC Asia Pasifik	
	1. AMARC Asia Pacific Conference	19
	2. Kongres JRKI	
	2. JRKI Congress	19
	3. Jambore Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) IT dan Kunjungan ke Desa Pengguna Sidekem	
	3. KPMD (Village Empowerment Agent) IT Jamboree and Visit to Sidekem User Village	20

II. Pengembangan Pengetahuan

23

II. Knowledge Development

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan lembaga mengenai hak kekayaan intelektual 1. Improving the knowledge and understanding on intellectual property	25
2. Pengembangan dan penguatan SID Berdaya dengan hak kekayaan intelektual 3. Protecting and strengthening SID Berdaya with the right of intellectual property	26
3. Optimalisasi integrasi Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) dengan SID Berdaya 3. Optimizing the Integrated Regency Information System (SIKAB) with SID Berdaya	27
4. Pengembangan Portal SID Berdaya sebagai Pusat Layanan Penggunaan dan Pendampingan SID Berdaya 4. Developing SID Berdaya Portal as the Center of Service and Assistance of SID Berdaya	28
5. Pembuatan Sistem Informasi Direktori Regulasi 5. Establishing Regulatory Directory Information System	29

III. Penguatan Kapasitas

31

III. Capacity Building

A. Penguatan Kapasitas Eksternal A. External Capacity Empowerment	1. Diskusi eksternal 1. External Discussion	35
	2. Pelatihan jurnalistik untuk media komunitas 2. Journalistic training for community media	37
	3. Pelatihan website desa 3. Website training	37
	4. Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) 4. SID training	38

B. Penguatan Kapasitas Internal		
B. Internal Capacity Empowerment	1. Pengembangan Ekonomi Kreatif 1. Creative economy development	49
	2. Pelatihan Keamanan Digital 2. <i>Digital security training</i>	50
	3. Pelatihan <i>Photo Story</i> 3. <i>Photo story training</i>	51
	4. Lokalatih Mobilisasi SDO Organisasi Masyarakat Sipil 4. SDO mobilization training for civil organization	52

IV. Capaian Mitra 55

IV. Achievement of Our Partners

1. Peluncuran SIKAB di Gunungkidul 1. <i>SIKAB Launching in Gunungkidul</i>	57
2. PPID Award 2017 Tingkat Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Desa Ngumbul 2. <i>Provincial PPID Award 2017 for the government of Pacitan Regency and Ngumbul Village</i>	59

V. Lampiran 61

V. Appendix

Pengantar

Foreword

Melawan Disinformasi, Menjaga Data Pribadi

Fighting Disinformation,
Protecting Personal Data

Disinformasi saat ini menjadi musuh bersama seluruh negara bangsa. Sekitar dua tahun lalu di Filipina, misalnya, saat citra Presiden Rodrigo Duterte sangat buruk terutama terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia, banjir informasi palsu tentang kebaikan dia meruyak. Termasuk di dalamnya informasi bahwa Bill Gates-saking terkesannya kepada Duterte--akan berinvestasi senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat di Filipina. Kasus lainnya adalah skandal Cambridge Analytica

Nowadays, disinformation has become the common enemy for everyone from any nation. Two years ago, for example, when Philippine President Rodrigo Duterte's image was becoming worse for his human right violation, fake information regarding his action began to captivate the internet. One of the fake news is the rumor of Bill Gates investing 20 million USD to Philippine because Bill Gates was impressed with Duterte's action. Another case is the Cambridge Analytica scandal

di belakang terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang kemudian menjadi bola salju diskursus pelanggaran data pribadi melalui media sosial. Belum lagi di belahan Afrika di mana mudah sekali media resmi memantulkan informasi yang sumbernya tidak jelas.

Beragam upaya telah dilakukan di sana sini untuk mengatasi disinformasi. Mulai dari membuat segepok regulasi hingga memperbesar arus gerakan literasi. Namun, krisis ini multidimensi dan sayangnya semua harus diselesaikan secara simultan agar dampaknya optimal. Warga sudah dalam tingkat kerentanan tinggi terhadap gelombang informasi palsu yang memang sengaja disebarluaskan untuk memanipulasi publik. Teknologi informasi telanjur menelurkan banyak cara baru berkomunikasi, dan yang terdepan tentu media sosial.

Disinformasi sesungguhnya bisa dimulai di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Komunikasi digital lantas membuatnya menjadi makin tak terbendung. Bagi kami, yang tulang punggung gerakannya adalah pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, titik pijak analisis masalahnya adalah faktor manusia. Artinya bukan lagi sekadar fokus pada hal teknis seperti pengembangan aplikasi dan fitur baru penangkal informasi palsu misalnya.

Merujuk pengalaman kami, disinformasi tidak hanya terkait politik praktis dari desa hingga negara. Disinformasi bisa sengaja diproduksi dan disebarluaskan

behind Donald Trump's presidential campaign that would later snowballed into a discourse of data privacy violation on social media. On the other, people in Africa have the tendency to easily spread any unreliable information on the internet.

Many efforts have been taken to block the waves of disinformation by issuing a lot of regulations and strengthening the literacy. However, the multi-dimentional crisis remains unstoppable and it needs to be contained simultaneously. The people in general are very vulnerable to fake information that is deliberately circulated to manipulate the public. It is caused by the advancement of technology that breeds many new kinds of communication including the social media.

Basically, disinformation can be started by anyone, anywhere, anytime and digital communication only makes it worse. For us, whose backbone is the technological advancement and utilization, the right analytical perspective for the issue is the human factor. In other words, it is more than just some technical matters such as the development of a feature or applications but the human who utilize the technology.

Our experience shows that disinformation is not only related with the practical politics in the level of village and country. It is also related with money motivation, individual claim for success, project claim, and the disfiguration of others people's image. The perpetrator and victim might also be more than just an individual

dengan motivasi uang, klaim keberhasilan individu, klaim pencapaian target proyek hingga penghancuran citra pihak lain. Pelaku maupun korbannya tidak terbatas politisi melainkan bisa individu, kelompok warga maupun organisasi lokal hingga internasional.

Sistem Informasi Desa (SID) dapat menjadi contoh bahan disinformasi yang digulirkan beberapa pihak untuk kepentingan tersebut. Media sosial masih menjadi alat efektif untuk menyebarkannya. Riset Buzzfeed menyebutkan, dalam masa pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016, 20 informasi palsu di Facebook yang paling mendapat respons ternyata disebarluaskan lebih banyak dibandingkan 20 informasi akurat yang paling mendapat respons. Demikian juga dengan disinformasi di sekeliling kita yang begitu mudah mendapatkan respons, entah berupa ikon jempol hingga *share* tanpa ada upaya verifikasi informasinya secara detil. Dalam kasus SID, akibatnya adalah cara pandang pemerintah desa hingga pusat yang lebih fokus pada seberapa cepat aplikasi bisa direplikasi, bukan pada prinsip penerapannya yang membutuhkan perubahan kultur berupa semangat antikorupsi misalnya.

Namun di sisi lain, reaksi para pengambil keputusan publik terhadap fenomena ini juga tidak semuanya lepas dari kritik. Salah satunya saat Dewan Pers menegaskan bahwa selain media berbadan hukum yang terdaftar di Dewan Pers, maka media tersebut tidak berada di kuadran

but also some groups of people, local institution, and international organization.

Village Information System (SID) is the object of disinformation circulated by some parties for that interest and Social media still becomes an effective tool to spread hoax. A research conducted by Buzzfeed shows that during the 2016 presidential election in United States, 20 fake information managed to gain more attention than the other 20 more accurate and reliable news. The same phenomenon also occurred in our surrounding. Everyone can easily react to fake news simply by hitting the like button or even sharing it without checking the information beforehand. In SID's case, it also affects the way the village government's perspective in circulating information. The village government tends to focus on how the speed to replicate an application rather than its basic implementation principle that needs to be adjusted to a certain cultural trend such as the spirit of anti-corruption.

Meanwhile, the reaction made by the decision maker regarding this phenomenon can still be criticized. One of the critics was when the Press Council emphasized that the disinformation is circulated by unofficial media that is unregistered under the law. On the other hand, some registered medias even do not favor the public interest by circulation one-sided news. This becomes a great loss for professional and citizen journalists who have been practicing the principle of journalism. If the unofficial media remain unchecked,

yang sama dengan media resmi. Sungguh ini kerugian besar terutama bagi para jurnalis dan media warga yang berupaya keras membuat informasi di tengah warga sekitarnya dengan menerapkan prinsip jurnalistik. Bandingkan dengan media yang dinilai resmi namun proses penyajian beritanya tidak dilambari semangat kepentingan publik.

Seperti halnya dalam transaksi informasi, ada perbedaan mendasar antara prinsip keterbukaan data (*open data*) dan informasi publik. Prinsip *open data* adalah membuka data seluas-luasnya kepada publik sedangkan informasi publik adalah melakukan pemilihan data untuk melindungi data sesuai peruntukan publik. Sering kali karena ketidaktahuan dan kelalaian maka data dan informasi terabaikan untuk dilindungi, terutama terkait dengan data pribadi warga.

Kami menyikapi isu disinformasi dan perlindungan data pribadi secara serius. Kami memulainya dengan mengintegrasikan prinsip yang kami yakini tentang dua hal tersebut dalam program kerja kami, termasuk di dalamnya pengembangan SID dan media komunitas. Kampanye kami lakukan melalui serangkaian diskusi dan publikasi. Saat Kementerian Kominfo mengeluarkan regulasi tentang registrasi kartu SIM misalnya, kami dinilai melawan arus karena pagi-pagi sudah menyoal jaminan perlindungan data pribadi pelanggan. Belakangan terbukti aturan tersebut *toh* direvisi dan

the effort to block disinformation made by the journalist and anyone who apply the principle of journalism will be in vain.

Similar to other information transactions, there are basic differences between the principle of openness (*open data*) and public information. The *open data* principle means opening the data as widely as possible while public information sorts out the data to be protected before releasing it to the public. Unfortunately, this difference is often blurred and ignored. As the result, the data and information become unprotected especially related to citizen personal data.

As an institution, we are taking the issue of disinformation and data privacy seriously. We began our work by integrating our principal regarding both issue into the work program. Two of them are the development of SID and community media. We are also trying to increase the awareness regarding these issues by organizing a series of discussion and publication. For example, when the Ministry of Informatics issued the regulation of obligatory Sim registration, we question the guarantee that protect the user's personal information. As it turned out, the policy was revised and the issue of data privacy protection resurfaced while the law to protect the data privacy remained undiscussed by the parliament.

In 2017, we initiated the idea of SID *Berdaya* license. Although we are not a tech-based company and we do not have economic motivation, the initiative was taken to maintain our principle through the process

isu perlindungan data warga kembali menguap. Sementara UU Perlindungan Data Pribadi tak juga dibahas di parlemen.

Pada 2017, lisensi SID Berdaya juga mulai kami bahas. Bukan berarti kami sok bergaya perusahaan aplikasi karena jelas bukan motivasi ekonomi yang melatarbelakanginya melainkan untuk menjaga prinsip dan proses di balik aplikasi. Ini sekedar upaya kecil yang kami mampu untuk melindungi desa dari gempuran disinformasi oleh pihak tertentu yang sering meninggalkan desa bukan karena desa sudah mampu mengelola potensinya sesuai prinsip tata kelola yang baik, melainkan karena tak ada lagi madu yang bisa dihisap.

Imung Yuniardi
Direktur CRI

in making the application. It is just our effort to protect the villages from the wave on disinformation made by certain parties: those who leave the village not after empowering them, but after they suck dry the village from any benefit they can get.

Imung Yuniardi
Director of CRI



Advokasi

Advocacy

A

Kampanye Isu Issue Campaign

1.

Peran media komunitas dalam melawan hoax

The role of community media in fighting hoax

2.

Registrasi kartu simcard dan keamanan data pribadi

Simcard registration and personal information security

3.

Diskusi buku dan pemaparan hasil riset "Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru" bersama pegiat media komunitas

Book and Research Discussion: "Community Media in the Middle of New Media Wave" with the Activists of Community Media

B

Partisipasi dalam Agenda Mitra

Participation in Partner's Agenda

1.

Konferensi AMARC Asia Pasifik

AMARC Asia Pacific Conference

2.

Kongres JRKI

JRKI Congress

3.

Jambore Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) IT dan Kunjungan ke Desa Pengguna Sidekem

KPMD (Village Empowerment Agent) IT Jamboree and Visit to Sidekem User Village

Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan-tantangan baru dalam upaya mengembangkan pengelolaan informasi dan sumber daya berbasis komunitas. Maraknya *hoax* hingga adanya ancaman terhadap data pribadi warga menjadi isu yang tak bisa diabaikan. Selain terus mengikuti perkembangan yang tengah berlangsung, CRI juga merasa perlu untuk segera merespons sejumlah isu yang kami pandang bisa berdampak langsung bagi warga. Oleh karena itu, sepanjang 2017, kami melakukan upaya advokasi melalui sejumlah kampanye isu baik dengan menggandeng pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan isu tersebut maupun dengan media.

The evolving of information technology gives birth to new challenges in developing the community-based information and resource management. Hoax and threat towards privacy become inevitable. CRI does not only keep up with the current technological advancement. CRI also finds it necessary to respond to any issue that might affect the life of the citizens. Therefore, by cooperating with expert and parties in the field of media, we carried out advocacy and campaign to respond several media-related issues.

A. Kampanye Isu

1. Peran media komunitas dalam melawan hoax

Berdasarkan riset kami di sejumlah daerah pada tahun 2016 lalu, media komunitas menjadi ujung tombak masyarakat untuk menangkal radikalisme, gerakan pemberdayaan masyarakat, mitigasi bencana dan sarana penyalur aspirasi warga. Melalui media komunitas, masyarakat bisa memenuhi hak-hak mereka atas informasi sekaligus menyampaikan informasi penting untuk komunitas atau masyarakat. Selain itu, media komunitas menjadi kekuatan warga untuk merebut kembali posisi subyek yang selama ini dimonopoli oleh perusahaan media.

Sayangnya, hingga kini media komunitas tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Bahkan pada 2017 lalu, Dewan Pers mengeluarkan sertifikasi bagi seluruh pelaku media. Kebijakan itu dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengatasi penyebaran hoax yang semakin cepat dan masif di era digital.

Kebijakan tersebut mengharuskan sebuah media berbadan hukum pers untuk bisa disebut legal. Untuk mendapatkan badan hukum pers, bentuk organisasi media harus berupa yayasan, koperasi ataupun perseroan terbatas (PT). Umumnya, media di Indonesia mengambil bentuk PT. Batasan mengenai bentuk organisasi itu tidak mudah untuk dipenuhi oleh media komunitas yang umumnya dikelola komunitas warga dalam skala kecil. Logika media sebagai industri yang diacu oleh Dewan Pers dengan kebijakannya tersebut tentu berbeda

A. Issue Campaign

1. The role of community media in fighting hoax

According to our research on several regions in 2016, community media became the spearhead for the people to fend off radicalism, people empowerment, disaster mitigation, and aspirational channel. Through community media, the people can fulfill their right to receive and spread information for the interest of the community itself. Therefore, community media became the power of the people to reclaim their position as a subject monopolized by major media corporation.

Unfortunately, community media has not earned any support it deserves from the government until now. In 2017, The Press Council released certification for all actors in media in order to contain the rapidly spreading hoax news in digital world.

The policy obliges the media to be registered as legal entity. However, in order to be legally registered, the media organization must be established as a foundation, *Koperasi* (cooperative) or limited liability company (PT). In general, media in Indonesia are established as PT. This limitation turns out to be not easy to fulfill by the community media who act as small institution. In that sense, the logic of media referred by the Press Council is different with the logic of community media. Although the decision made by the Press Council aligns with the mandate

dengan logika media komunitas. Meski kebijakan Dewan Pers tersebut sesuai dengan amanat UU Pers, namun inisiatif media komunitas yang benar-benar menjadi sarana produksi dan konsumsi informasi warga sekitarnya menjadi tak terlindungi.

Sebagai salah satu lembaga yang mendampingi beragam media komunitas di Indonesia sejak tahun 2001, kami

of law press, the community media that serve as information production and distribution platform becomes unprotected.

As one of the institutions that has been assisting various community media in Indonesia since 2001, we are trying to enlighten everyone that community media needs some space to live and grow.



Diskusi publik bertajuk "Media Komunitas Melawan Hoax" bersama Ahmad Djauhar (Wakil Ketua Dewan Pers), Suwarjono (Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia), Ahmad Rofahan (Pegiat Media Komunitas Jingga Media) dan Imung Yuniardi (Direktur CRI), serta Lisa Lindawati (Dosen Komunikasi UGM) sebagai moderator.

A public discussion titled "Media Community Against Hoax" with Ahmad Djauhar (Deputy Chairman of the Press Council), Suwarjono (Chairperson of the Alliance of Indonesian Independent Journalists), Ahmad Rofahan (Media Community Activist of Jingga Media Community) and Imung Yuniardi (Director of CRI), as well as Lisa Lindawati (UGM Communication Lecturer) as moderator.

berupaya memberikan pemahaman bahwa media komunitas perlu diberi ruang untuk terus hidup dan berkembang. Media komunitas adalah pilar yang perlu diperhitungkan di tengah konglomerasi media. Media komunitas sepatutnya dirangkul dan diposisikan di barisan depan dalam perang melawan hoax bersama kelompok masyarakat sipil lainnya.

Sepanjang 2017, kami berupaya mengampanyekan peran media komunitas dalam mengantisipasi *hoax* yang terjadi di masyarakat. Kampanye tersebut adalah respons kami terhadap kebijakan Dewan Pers tentang sertifikasi media sebagai salah satu cara menanggulangi hoax. Salah satunya melalui diskusi publik bertajuk "Media Komunitas Melawan Hoax" di Gedung University Club UGM pada 04 Februari 2017. Hadir sebagai narasumber Ahmad Djauhar (Wakil Ketua Dewan Pers), Suwarjono (Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen), Ahmad Rofahan (Pegiat Media Komunitas Jingga Media) dan Imung Yuniardi (Direktur CRI), serta Lisa Lindawati (Dosen Komunikasi UGM) sebagai moderator.

Isu mengenai dampak kebijakan Dewan Pers terhadap media komunitas itu juga kami kemas dalam beberapa artikel yang diterbitkan di website kami, yakni *combine.or.id*. Kami juga menunjukkan posisi kami terkait kebijakan yang dikeluarkan Dewan Pers melalui beberapa peryataan yang dikutip media massa seperti surat kabar *Kompas*. Kami berharap, tersebarnya gagasan mengenai media komunitas dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendorong regulasi yang lebih ramah terhadap media komunitas.

Community Media is a pillar that should be taken into account in the middle of media conglomeration. In that sense, it should be positioned at the front in combating the hoax along with the civilians.

Over the course of 2017, we were campaigning the role of community media in anticipating the circulating hoax. The campaign was also our response towards the policy made by the Press Council regarding media certification to fight hoax. Furthermore, we also organized a public discussion titled "Community Media Againsts Hoax" in University Club Universitas Gadjah Mada on 4 February 2017. The discussion featured Ahmad Djauhar (Vice President of Press Council), Suwarjono (Chief of Indonesian Independent Journalist Association), Ahmad Rofahan (activist of Jingga Media community media), Imung Yuniardi (Director of CRI) and Lisa Lindawati as the moderator (Lecturer in Communication Science Program, Universitas Gadjah Mada).

We also tackled the issue regarding the impact of the Press Council's policy on community media in several articles published on our website, namely *combine.or.id*. We show our position regarding the policies issued by the Press Council through several statements quoted by the mass media such as the *Kompas* newspaper. We hope that the spread of ideas about community media can provide understanding to the community and encourage regulation that is more friendly to community media.

Wadahi Media Komunitas

Dewan Pers Diminta Tidak Terlalu Utamakan Verifikasi Administrasi

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan Dewan Pers memverifikasi media massa memunculkan pertanyaan dari pegiat media komunitas. Pada sisi konten, mereka mampu menyuguhkan berita jurnalistik berkualitas, tetapi dari sisi administrasi, mereka sulit memenuhi syarat perusahaan pers.



Direktur COMBINE (Community Based Information Network) Sung Yuniardi mengatakan, varat-syarat verifikasi media massa yang ditetapkan Dewan Pers sangat mustahil bisa dipenuhi oleh media komunitas. "Kami berharap Dewan Pers tidak hanya menggunakan perspektif perusahaan dalam melakukan verifikasi media. Kami khawatir kalau persyaratan administrasi sangat dilepaskan, teman-teman media komunitas akan tergerus," ucapnya, Jumat (6/1), saat diluncur dari Jakarta.

Berdasarkan riset COMBINE di sejumlah daerah, media-media komunitas menjadi ujung tombak masyarakat untuk menangkal radikalisme, gerakan pembedayaan masyarakat, mitigasi bencana, dan sarana penyularan aspirasi warga. Melalui media komunitas, masyarakat bisa memenuhi hak-hak mereka atas infor-

masi sekaligus menyampaikan informasi penting untuk komunitas atau masyarakat.

Berbasis kerlawanan

Menurut Imung, roh media komunitas bukan profit, melainkan berbasis pada kewarawanan. Karenanya itu, media komunitas tidak bisa menggaji jurnalis-jurnalis warga sesuai standar upah minimum provinsi sebanyak 13 kali setahun, seperti disyaratkan Dewan Pers dalam verifikas.

"Ini momentum bagi Dewan Pers bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menentukan batasan-batasan agar tidak meneckan keberadaan media komunitas dan tidak membuat kerancuan antara media arus utama dan media komunitas," ujar Imung.

Keberadaan media arus utama dan media komunitas bisa saling melengkapi. Media komunitas

menangkap pesan dari media arus utama kemudian menggalikannya ke masyarakat. Begitu juga sebaliknya, media arus utama membutuhkan media komunitas untuk mewacanakan aspirasi masyarakat.

Bagaimanapun,jangkauan media arus utama ke daerah terbatas. Hanya media komunitas yang bisa menembus jauh ke dalam.

Selain dengan membenahi syarat-syarat administratif perusahaan pers, menurut Imung, upaya pemberantasan media abal-abal dengan segala macam pembelaan palsunya. Sekarang, gerakan pemberantasan media abal-abal penyebab berita palsu sebaiknya perlu dilakukan secara cenderung dilakukan secara reaksional dan parstital.

Usulan serupa disampaikan Koordinator Advokasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Iman Abda. Menurut dia, verifikasi serta pemberian logo pada media yang dilakukan Dewan Pers sebagai upaya Dengan Pers dan Kominfo bisa mengandeng media-media komunitas untuk menengah media abal-abal dengan segala macam pembelaan palsunya. Sekarang, gerakan pemberantasan media abal-abal penyebab berita palsu sebaiknya perlu dilakukan secara cenderung dilakukan secara reaksional dan parstital.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prisetyo atau Stanley menjelaskan, verifikasi media bertujuan memberantas media abal-abal, media penyebab *hoax* dan media *buzzer*, bukan media kecil yang tengah dirintis tetapi mau bekerja profesional

BUTIR-BUTIR KESEPAKATAN AMBON

Butir-butir Kesepakatan Ambon yang akan ditandatangani beberapa perwakilan perusahaan pers pada Hari Pers Nasional 9 Februari 2017 di Ambon:



DEWAN PERS

Sumber: Dewan Pers

Perusahaan-perusahaan pers yang sudah menetapkan empat butir kesepakatan ini akan mendapat logo dari Dewan Pers.



ENTOGRAFIE: ANDRI

sebaiknya disertai dengan upaya penyadaran melebihi media bagi warga.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prisetyo atau Stanley menjelaskan, verifikasi media bertujuan memberantas media abal-abal, media penyebab *hoax* dan media *buzzer*, bukan media kecil yang tengah dirintis tetapi mau bekerja profesional

sesuai kode etik jurnalistik. "Media yang sedang dirintis silakan mendaftarkan diri ke Dewan Pers melalui asosiasi-asosiasi jurnalis," kata Stanley.

Namun, banyak media kecil dan media komunitas yang belum tergabung dalam asosiasi jurnalis sehingga tidak jelas ke mana mereka harus "berlin dung". (ARK)

combine KOMPAS - Sabtu, 07 Januari 2017

Melalui Harian KOMPAS (01/10/2017) CRI menegaskan posisinya terkait kebijakan verifikasi media yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Through the KOMPAS daily (2017/01/10) CRI addressed its position regarding the media verification policy issued by the Press Council.



MEDIA KOMUNITAS

- media yang dibangun oleh, dari, dan untuk komunitas
- menyampaikan informasi mengenai berbagai peristiwa maupun persoalan yang dihadapi komunitas warga
- menerapkan prinsip jurnalistik
- para penggiat media komunitas kerap disebut sebagai pewarta warga ataupun jurnalis warga

BENTUKNYA



Dan lain-lain

#TurnBackHoax
#MediaKomunitasLawanHoax

BAGAIMANA MEDIA KOMUNITAS MELAWAN HOAX?

1. Pewarta warga harus bisa mengenali hoax

2. Sebelum membagi informasi pastikan bahwa :

- | | |
|--|--|
|  Sumber informasinya bisa dipercaya
 Informasinya berdasarkan fakta
 Narasumbernya lebih dari satu orang
 Jika berupa foto, cek dulu apakah foto tersebut foto baru atau foto lama yang dipakai ulang | Alamat redaksi, penulis/editor media dicantumkan dengan jelas

Berita tersebut sudah memiliki data 5W1H yang lengkap

Narasumbernya mewakili pihak-pihak yang diberitakan
 |
|--|--|

**CEK SEBELUM SEBAR
SEBAR JIKA BENAR
JANGAN SEBAR JIKA MERAGUKAN**

3. Ajak dan bantu warga sekitar untuk mengecek informasi yang diterima

4. Perbanyak informasi tentang berbagai persoalan yang dihadapi warga. Sebar informasinya dan ajak warga bersama-sama mencari solusinya.

combine
resource institution
<http://combine.or.id>

2. Registrasi kartu simcard dan keamanan data pribadi

Pada Oktober 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pengguna telepon seluler mendaftarkan nomor teleponnya dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK). Kami memandang kebijakan tersebut berpotensi mengabaikan perlindungan data pribadi warga. Tidak hanya itu, kebijakan itu juga terkesan lebih berorientasi pada kebutuhan industri daripada kepentingan masyarakat.

Sebagai respons atas kebijakan tersebut, kami menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Regulasi Seluler: Wajib Registrasi, Perlindungan Tak Pasti”. Diskusi yang diselenggarakan pada Sabtu, 28 Oktober 2017 tersebut mengundang Dr. Sinta Dewi Rosadi SH., LL. M (Ketua Cyber Law Center, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), Heru Tjatur (CTO Kumparan) dan Ir. Rony Primanto, MT (Kepala Dinas Kominfo DIY) sebagai narasumber serta Idha Saraswati (Combine Resource Institution) sebagai moderator. Diskusi tersebut diselenggarakan di Hotel Universitas Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sipil, aparatur sipil negara, akademisi, hingga pegiat sosial.

Salah satu hal yang perlu dicermati dalam menerapkan kebijakan registrasi kartu prabayar adalah perlunya peninjauan ulang karena saat ini Indonesia belum

2. Sim card registration and personal information security

On October 2017, The Ministry of Communication and Informatics (Kemenkominfo) issued a policy that oblige every cell phone user to register their phone number by using the ID number (NIK) and family card number (KK). We consider this policy to be harmful for the privacy of the citizen's personal data. On the other hand, the policy seems to be favoring the industrial needs more than the citizen.

As a response, we organized a public discussion titled "Cellular Regulation: Obligatory Registration, Obligatory Insecurity". It was held on Saturday, 28 October 2017 by featuring Dr. Sinta Dewi Rosadi SH., LL. M (Chief of Cyber Law Center, Faculty of Law, Padjajaran University), Heru Tjatur (CTO of Kumparan) and Ir. Rony Primanto, MT (head of Kominfo Yogyakarta) as the speakers and Idha Saraswati (Combine Resource Institution) as the moderator. The discussion took place in Yogyakarta State University Hotel and was attended by many participants from all ages and background such as students, civil servants, scholars, and social workers.

One of important matters regarding this registration issue is the needs to reconsider the policy itself. Indonesia still does not have any law that specifically regulate the security of its citizen's personal data. The privacy of personal information is one of the highest rights of every citizen. Unfortunately, the current

memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Tanpa adanya jaminan UU tersebut, data-data sensitif yang digunakan saat registrasi kartu prabayar rentan disalahgunakan. Kebijakan regulasi prabayar berbasis NIK dan KK membuat posisi pengguna kartu menjadi rentan karena data pribadinya menjadi dasar validasi. Padahal data pribadi merupakan salah satu bentuk hak tertinggi yang dimiliki setiap individu.

Peraturan yang menyangkut perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih sangat umum. Mekanisme yang tidak transparan antara operator penyedia layanan telekomunikasi dan kementerian terkait (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika) membuat posisi masyarakat menjadi sangat lemah apabila data-data sensitif itu bocor dan disalahgunakan. Pasalnya, masyarakat tidak tahu sejauh mana operator membuat perjanjian dengan Direktorat Jeneral Disdukcapil. Padahal data pribadi isinya sangat rahasia dan harus mendapatkan jaminan perlindungan yang tepat.

Selain persoalan mengenai keamanan data pribadi, beberapa peserta diskusi juga mempertanyakan permasalahan-permasalahan lain yang masih luput dari perhatian khalayak. Misalnya saja dampak kebijakan registrasi ini bagi warga dari kelompok termarjinalkan yang selama ini kesulitan akses untuk membuat KK maupun KTP. Dengan aktifnya para partisipan diskusi, kami menghimpun

regulation makes the NIK and KK-based registration prone to misappropriation.

The scope of regulation that encompasses the privacy of personal information in Indonesia is very general. The intransparency of mechanism between cellular operator, Ministry of Internal Affair, and Ministry of Communication and Informatics ends up harming the citizen's privacy if the data were leaked. Moreover, the citizens do not even understand the extend of the agreement made between The Directorate of Civil Registration and other parties even though personal information must be protected and classified.



Dr. Sinta Dewi Rosadi SH., LL. M (Ketua Cyber Law Center, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran) dalam Diskusi publik bertajuk "Regulasi Seluler: Wajib Registrasi, Perlindungan Tak Pasti" menjelaskan mengenai alasan registrasi kartu prabayar di beberapa negara.

Dr. Sinta Dewi Rosadi SH., LL. M (Chair of the Cyber Law Center, Faculty of Law, Padjajaran University) explain regarding the reasons for registering prepaid cards in several countries in public discussion entitled "Cellular Regulations: Mandatory Registration, Uncertain Protection"

banyak sudut pandang berbeda terkait kebijakan pendaftaran nomor dengan KK atau NIK. Perbedaan sudut pandang ini menjadi bahan kajian sekaligus refleksi untuk melihat sejauh mana persoalan data pribadi di Indonesia akan terus bergulir.

Some participants during the discussion also asked about any issue that might be missed by the people in general. Including the impact of the registration policy towards marginalized groups that barely have access for KK and Identity Card. From the discussion, we managed to gather many perspectives regarding this issue that can be useful to see the development of this privacy issue in the future.



Diskusi publik bertajuk "Regulasi Seluler: Wajib Registrasi, Perlindungan Tak Pasti" bersama Dr. Sinta Dewi Rosadi SH., LL. M (Ketua Cyber Law Center, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), Heru Tjatur (CTO Kumparan) dan Ir. Rony Primanto, MT (Kepala Dinas Kominfo DIY) sebagai narasumber serta Idha Saraswati (CRI) sebagai moderator.

Public discussion entitled "Cellular Regulations: Mandatory Registration, Uncertain Protection" with Dr. Sinta Dewi Rosadi SH., LL. M (Chair of the Cyber Law Center, Faculty of Law, Padajaran University), Heru Tjatur (CTO Kumparan) and Ir. Rony Primanto, MT (Head of the Office of Communication and Information DIY) as the resource person and Idha Saraswati (CRI) as the moderator

3. Diskusi buku dan pemaparan hasil riset “Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru” bersama pegiat media komunitas

Pada 2016, CRI bersama Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya (UAJY) melakukan riset mengenai media komunitas. Tujuan riset tersebut adalah untuk melihat sejauh mana media komunitas, terutama yang berplatform radio, beradaptasi dengan perkembangan teknologi internet atau media baru. Ada dua asumsi yang melatarbelakangi penelitian ini. *Pertama*, sejumlah media komunitas, khususnya radio komunitas yang notabene menggunakan teknologi analog kesulitan beradaptasi karena cepatnya perkembangan media internet sehingga eksistensinya semakin tergerus. *Kedua*, sebaliknya, media komunitas berhasil memanfaatkan internet sehingga mampu memperluas jangkauan informasinya.

Hasil riset ini sudah beberapa kali kami diskusikan bersama publik, pertama pada perhelatan kegiatan Jagongan Media Rakyat 2016 dan yang kedua dalam diskusi di Universitas Atma Jaya (UAJY). Meski begitu, hasil riset yang kami lakukan tersebut malah belum terpublikasikan dengan baik kepada subyek-subyek penelitian kami. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami kepada rekan-rekan media komunitas yang telah bekerjasama dengan kami dalam proyek penelitian tersebut, kami menyelenggarakan diskusi pada 18-22 Desember di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Lombok menjadi tujuan pertama diskusi ini karena terdapat dua subyek penelitian yang cukup dominan (secara kuantitas), yakni

3. Book and Research Discussion titled “Community Media in the Middle of New Media Wave” with the Activist of Community Media

In 2016, CRI and Communication Science Department of Atma Jaya University carried out a research on community media. The research aimed to see how far the community media, especially those operating as radio station, adapt with the evolving internet technology and new media. There were two assumption that served as the background for the research. First, radio community were barely innovating and adapting with the internet with their analog equipment. Hence, slowly and surely bringing them to extinction. Second, some community medias managed to utilize the internet to extend their reach.

The result of the research has been publicly discussed in *Jagongan Media Rakyat 2016* and discussion held in Atma Jaya University. However, the research itself has not been well-published to the research subjects themselves. So, as one of our responsibility to the community medias that cooperated during the research, we planned to hold a public discussion on 18 to 22 December in Lombok, West Nusa Tenggara.

Lombok was chosen as the first location for our discussion because it is the home of two of our most quantitatively contributing research subjects: Speaker Kampung and Primadona FM. The discussion will also become our chance to learn more about the development of those two community medias for future research.

Speaker Kampung dan Primadona FM. Forum diskusi ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk terus menggali perkembangan terbaru media komunitas pascariiset yang berguna bagi perencana riset lanjutan.

Diskusi hari pertama kami selenggarakan pada tanggal 19 Desember 2017. Kami mendatangi sekretariat Speaker Kampung di Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Kemudian kami melanjutkan diskusi ke Primadoma FM pada 21 Desember 2017. Kedua media komunitas yang kami kunjungi, baik Speaker Kampung maupun Primadoma FM, sangat antusias terhadap hasil penelitian yang kami lakukan.

The first discussion took place at Ketangga Village, Suela District, East Lombok on 18 December 2017. Then, we continued the next discussion to Primadona FM on 21 December 2017. Both community medias who hosted the discussion were welcoming and enthusiastic.



Diskusi menanggapi hasil riset "Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru" bersama pegiat media komunitas Speaker Kampung di Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 19 Desember 2017

The discussion responded to the presentation of the results of the research "Community Media Struggle in the Middle of New Media Age" along with community media activists, Speaker Kampung, in Ketangga Village, Suela District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara, December 19, 2017.

B. Partisipasi dalam Agenda Mitra

1. Konferensi AMARC Asia Pasifik

Semenjak bergiat bersama warga dalam media komunitas, radio komunitas menjadi salah satu jenis media komunitas yang akrab dengan CRI. Terkait dengan itu, kami memenuhi undangan dari Asosiasi Radio Komunitas Sedunia (AMARC) wilayah Asia-Pasifik untuk menghadiri konferensi bertajuk "The Perspectives on Community Radio (CR) in Thailand and Global Context." Konferensi tersebut diselenggarakan oleh National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) Thailand dan AMARC Asia-Pasifik di Bangkok Thailand pada 15 – 17 November 2017. Selain mengikuti seluruh rangkaian konferensi, CRI juga menjadi salah satu narasumber dalam diskusi mengenai pelibatan remaja dalam radio komunitas, dengan tema "Why is youth participation important and how can Community Radio achieve that?" bersama narasumber lainnya dari Thailand dan Bangladesh.

2. Kongres JRKI

Selain terlibat dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh NBTC-AMARC, CRI juga terus menjalin relasi dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI). Tahun lalu, JRKI akhirnya menggelar kongres yang seharusnya dilakukan pada tahun 2015. Agenda utama kongres adalah memilih struktur pengurus baru yang akan bertugas selama empat tahun ke depan. Kongres yang berlangsung dari 7 – 9 November 2017 juga diisi dengan berbagai diskusi dan workshop.

B. Participation in Partner's Agenda

1. AMARC Asia Pacific Conference

Ever since we have been working together with the people in community media, community radio has been very close to CRI. Therefore, we accepted the invitation made by World Community Radio Association (AMARC) of Asia-Pacific region to attend the conference titled "The Perspective on Community Radio (CRI) in Thailand and Global Context". The conference was organized by the National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) of Thailand and AMARC of Asia Pacific in Thailand from 15 to 17 November 2017. Moreover, CRI did not only attend the conference as participant, but also as one of the speakers in discussion the involvement of teenager in community radio titled "Why is youth participation important and how can Community Radio achieve that?" along with other speakers from Thailand and Bangladesh.

2. JRKI Congress

CRI does not only establish connection with the attendee of NBTC-AMARC, but also with the member of the Network of Indonesian Community Radio (JRKI). In 2017, JRKI held a congress that should had been organized in 2015. The main agenda of the congress was to assemble the management team for the next four years. The congress started from 7 to 9 November 2017 and consisted of various discussions and workshops.

CRI diundang untuk menghadiri rangkaian acara kongres tersebut. Selain sebagai tamu, CRI juga diminta untuk mengisi satu sesi diskusi yang membahas tema “Radio Komunitas Media Adil Gender dan Peduli Anak”. Kehadiran CRI di kongres juga sekaligus dilakukan sebagai bagian dari tim *steering committee* program Radio Darurat Tangguh (Radar Tangguh) bersama Program Studi Ilmu Komunikasi UAJY, JRKI dan Radio FMYY Jepang. Program Radar Tangguh disosialisasikan sebagai salah satu rangkaian acara diskusi dalam kongres tersebut, dengan tema diskusi “Radio Komunitas: Mengudara untuk Indonesia Tangguh”.

3. Jambore Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) IT dan Kunjungan Desa Pengguna Sidekem

CRI berpartisipasi dalam kegiatan JAMBORE IT Desa 2017 sebagai peserta. Jambore tersebut merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Relawan TIK Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang tergabung di dalam Pusat Pemberdayaan Informatika dan Desa (PUSPINDES). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya bagi peserta jambore dan aparat pemerintah desa yang saat ini menjadi bagian penting dalam terwujudnya pembangunan Sistem Informasi Desa dan Kawasan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

CRI was invited to the congress not only as participant but also as speaker for a discussion titled “Community Radio’s Contribution for Gender Equality and Child Care”. Moreover, The attendance of CRI at the congress was also carried out as part of the steering committee of emergency radio program named Radar Tangguh along with the Department of Communication Science of Atma Jaya University, JRKI and FMYY Radio from Japan. During the congress, Radar Tangguh program was announced as one of the discussion topic titled “Community Radio: Airing for More Resilient Indonesia”.

3. KPMD (Village Empowerment Agent) IT Jamboree and Visit to the Village of Sidekem Users

CRI participated in Village IT JAMBOREE in 2017. The jamboree was the annual program held by the Volunteer of Information and Communication Technology (RTIK) of Pemalang Regency, Central Java. In organized the event, RTIK collaborated with Village and Information Empowerment Center (PUSPINDES). The program aimed to empower the human resource in the field of communication and technology especially the participant of the jamboree and the government apparatus involved in order to realize the establishment of the Village and Regional Information System mandated in in the constitution number 5 years 2014 regarding village empowerment.



CRI menjadi salah satu narasumber diskusi bertema "Why is youth participation important and how can Community Radio achieve that?" dalam rangkaian konferensi "The Perspectives on Community Radio (CR) in Thailand and Global Context" yang diselenggarakan National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) Thailand dan Asosiasi Radio Komunitas Dunia atau AMARC wilayah Asia-Pasifik di Bangkok Thailand pada 15 - 17 November 2017.

CRI became one of the speakers in the discussion with the theme "Why is youth participation important and how can Community Radio achieves that?" in the series of conferences "The Perspectives on Community Radio (CR) in Thailand and Global Context" organized by the National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) Thailand and the World Community Radio Association or AMARC Asia-Pacific region in Bangkok Thailand on November 15-17, 2017.



Pengembangan Pengetahuan

Knowledge Development

1.

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan lembaga mengenai hak kekayaan intelektual

Improving the knowledge and understanding on intellectual property

2.

Perlindungan dan penguatan SID Berdaya dengan hak kekayaan intelektual

Protecting and strengthening SID Berdaya with the right of intellectual property

3.

Optimalisasi integrasi Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) dengan SID Berdaya

Optimizing the Integrated Regency Information System (SIKAB) with SID Berdaya

4.

Pengembangan Portal SID Berdaya sebagai Pusat Layanan Penggunaan dan Pendampingan SID Berdaya

Developing SID Berdaya Portal as the Center of Service and Assistance of SID Berdaya

5.

Pembuatan Sistem Informasi Direktori Regulasi

Establishing Regulatory Directory Information System

Sejak berdiri pada 2001 hingga sekarang, upaya kami dalam mengembangkan pengelolaan informasi dan sumber daya berbasis komunitas telah menghasilkan berbagai produk pengetahuan. Pengembangan instrumen pengetahuan terus kami lakukan berbasis tinjauan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, inovasi tak mesti berupa penciptaan instrumen yang benar-benar baru. Justru, sebagian besar instrumen yang kami kembangkan berangkat dari hasil evaluasi terus menerus terhadap penerapan produk-produk pengetahuan yang sudah dikembangkan sebelumnya. Melalui siklus penciptaan itu, diharapkan agar berbagai instrumen yang dikembangkan bisa benar-benar memberi manfaat bagi warga.

Ever since CRI was established in 2001, we have been producing various product of knowledge as a way to develop to the information management and community-based resource. Meanwhile, we also keep developing the knowledge instrument based on the review of field needs. In that sense, innovation does not have to be something entirely new. In fact, most of the instruments we have developed are the result of continuous evaluation on the previous instruments. By using this cycle, it is expected that each instrument can contribute well for the sake of the community.

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan lembaga mengenai hak kekayaan intelektual

Bagi kami karya intelektual yang dihasilkan harus bisa bermanfaat bagi warga. Aspek manfaat yang berujung pada dampak perubahan yang positif adalah mutlak bagi semua produk pengetahuan yang kami hasilkan. Namun di sisi lain, karya intelektual juga mesti mendapat perlindungan hukum. Aspek perlindungan terhadap produk pengetahuan selama ini kami abaikan dengan satu keyakinan bahwa semua orang juga punya niat baik dalam penyebaran pengetahuan. Ternyata tidak hanya keyakinan tersebut kurang tepat, tapi justru bicara perlindungan karya intelektual juga berujung pada pemanfaatan yang lebih maksimal bagi para penggunanya.

Ini wacana yang relatif baru bagi lembaga atau pegiat terutama yang banyak bergerak di ranah teknologi informasi. Banyak pihak pada umumnya mengidentikkan mengurus hak cipta dan kekayaan intelektual berarti menghilangkan semangat berbagi. Padahal sebagai lembaga yang berusaha setia dengan prinsip *open source*, tentu CRI tidak lantas mengubah prinsip gerakan tersebut.

Beberapa diskusi dengan para pakar pun kami lakukan. Mulai dari Pusat *Cyber Law* Universitas Padjajaran Bandung hingga Pusat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang kami gandeng sejak 2017 ini. Termasuk di dalam rangkaian tersebut adalah *Focus Group Discussion* (FGD) Kekayaan Intelektual Produk TIK pada 24 Juli 2017 dengan narasumber utama Budi Agus Riswandi, Direktur Eksekutif Pusat HKI UII.

1. Improving the knowledge and understanding on intellectual property

Intellectual property must be contributing for greater good. Each intellectual product must be beneficial and positively impact the people's life. However, intellectual products must also be under the protection of the law. In the past, we used to ignore that protection over intellectual property since we considered that everyone has the right to freely spread knowledge. However, such belief turned out to be incorrect since talking about the protection of intellectual works actually leads to more maximum utilization for its users.

Protection over intellectual property is a relatively new discourse for CRI who move in the field of information technology. Many people think that copyright and intellectual property can obstruct the spirit of sharing. But, CRI still maintains the spirit of sharing by becoming an "open source" institution.

Moreover, we have discussed with experts from many institutions since 2017. They are Cyber Law Center of Padjajaran University in Bandung and The Center of Intellectual Property Rights (HKI) of Islamic University of Indonesia (UII) in Yogyakarta. We also invited Budi Agus Riswandi, the director of HKI UII as the key speaker in a focus group discussion about intellectual property rights on 24 July 2017.

From the discussion, we learned and concluded that CRI can still maintain its intellectual property rights while applying its spirit of knowledge sharing.

Pengetahuan yang didapatkan dari rangkaian diskusi tersebut membawa pemahaman baru bagi CRI tentang prinsip perlindungan kekayaan intelektual tetap bisa berjalan bersama dengan prinsip berbagi pengetahuan secara luas.

2. Perlindungan dan penguatan SID Berdaya sebagai kekayaan intelektual

Pemahaman baru yang mengenai hak kekayaan mendorong kami untuk mulai merancang konsep produksi, distribusi dan dokumentasi produk pengetahuan lembaga. Harapannya ke depan kami juga mampu mendampingi kelompok-kelompok warga untuk membenahi pengelolaan pengetahuan mereka yang begitu kaya.

Secara internal, salah satu produk pengetahuan yang kami benahi pengelolaannya adalah aplikasi sistem informasi desa (SID). Aplikasi ini sudah kami rintis dan kembangkan sejak 2009, jauh sebelum UU Desa disahkan pada 2014.

Sebelumnya, aplikasi SID dikembangkan dengan merujuk pada lisensi *Free and Open Source Software* (FOSS). Namun penerapan lisensi berbasis FOSS untuk aplikasi SID yang memuat *database* vital pemerintah desa tidak selalu menemukan konteks yang tepat. Ada banyak celah hukum dalam penggunaan lisensi FOSS untuk SID yang sulit dihubungkan dengan yurisprudensi hukum di Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, penting bagi kami untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual aplikasi sistem informasi desa

2. Protecting and strengthening SID Berdaya with the right of intellectual property

Our new knowledge on intellectual property rights motivated us to create a new concept of production, distribution, and intellectual product documentation. In the future, we hope that we can assist the communities to improve the management over their rich intellectual products.

Internally, one of our intellectual knowledge that has been reorganized is Village Information System (SID) Application. The application was released in 2009 and has been in continuous development ever since, long before the law on village was passed in 2014.

Prior to its release, SID was developed by referring to the Free and Open Source Software (FOSS) license. But, the context to implementation of FOSS license for SID that contain vital village government database was considered to be unsuitable. There were a lot of legal loophole in implementing FOSS license to SID since FOSS license was incompatible with the legal jurisprudence in Indonesia.

In order to tackle the problem, we considered that it was important to register SID's intellectual property right. It was aimed to emphasize the rights and responsibilities between CRI and SID Berdaya users while maintaining the principle of open source.

Copyright belongs to the creator(s). It is automatically given to them based on the

yang kami ciptakan. Pendaftaran KI SID ditujukan untuk mempertegas hak dan kewajiban secara hukum antara CRI dengan para pihak pengguna SID Berdaya, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip *Open Source*.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Salah satu langkah awal dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual itu adalah dengan memberikan nama bagi SID kami. Kami sepakat untuk memberikan nama (merk) "SID Berdaya" untuk aplikasi sistem informasi desa yang kami buat.

3. Optimalisasi integrasi Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) dengan SID Berdaya

Acara peluncuran program integrasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) di Kabupaten Gunungkidul sukses dilaksanakan pada Selasa, 25 April 2017. Terselenggaranya acara tersebut menegaskan Kabupaten Gunungkidul sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang telah memiliki sistem data yang terintegrasi dan berasal dari 144 desa yang

declarative principle after a product is created without reducing the limitation that in accordance with the regulation. Copyright is one of intellectual property with broad protection scope such as science, art and literary, and computer program. So, we agreed to begin the intellectual property registration by naming our SID application with "*SID Berdaya*".

3. Optimizing the Integrated Regency Information System (SIKAB) with SID Berdaya

The integration and utilization of Village Information System (SID) *Berdaya* and Integrated Regency Information System (SIKAB) in Gunungkidul was successfully launched on Tuesday, 25 April 2017. The launch also marked Gunungkidul as the first regency in Indonesia equipped with an integrated data system from 144 different villages. It was also the result from an initiative taken and directed by CRI and other parties in 2011.

CRI was directly involved in every phase of SID application and learning in Gunungkidul. CRI committed to oversee the early phase of SID implementation in village and regency level. The initiative to implement SID in Gunungkidul is only one of SID implementation in many regions in Indonesia over the course of the last 6 years. SID was also implemented in North Lombok Regency in October 2017 as SIKAB KLU. It was activated to integrate SID to 33 villages in North Lombok Regency. So, it is expected

dimiliki. Inisiatif yang telah berjalan sejak 2011 ini mulai menunjukkan keutuhan bentuknya sesuai konsep yang diarahkan oleh CRI bersama banyak pihak.

CRI yang terlibat langsung dalam setiap tahap pembelajaran dan penerapan SID di Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk terus mengawal tahap-tahap pemanfaatan SID, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Inisiatif penerapan SID di Kabupaten Gunungkidul ini semakin memperkaya catatan bentuk-bentuk inisiatif SID dari berbagai daerah di Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Prakarsa yang sama coba dilakukan di Kabupaten Lombok Utara. Pada Oktober 2017, SIKAB KLU diaktifkan untuk awali integrasi SID 33 Desa di KLU. Hal ini diharapkan dapat semakin memperjelas dan memperkuat skema pengembangan dan pemanfaatan SID yang lebih efektif dan efisien ke depan, baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten.

4. Pengembangan Portal SID Berdaya sebagai Pusat Layanan Penggunaan dan Pendampingan SID Berdaya

Salah satu upaya kami dalam meningkatkan, mengembangkan dan memperbarui SID adalah dengan melakukan pengembangan aplikasi pusat sumber daya SID atau portal SID. Portal SID Berdaya ditujukan sebagai pusat layanan dan pusat pengetahuan tentang SID Berdaya bagi lembaga pengguna dan lembaga pendamping SID Berdaya.

that the development and utilization scheme of SID can be more effective, efficient, and robust in the level of village and regency.

4. Developing SID Berdaya Portal as the Center of Service and Assistance of SID Berdaya

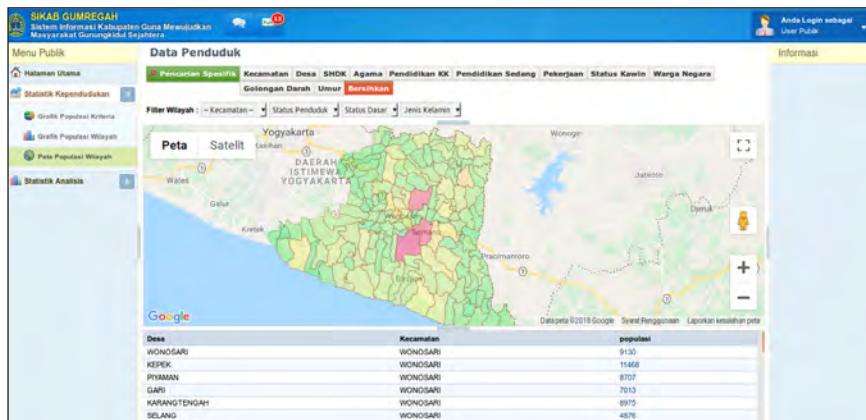
One of our way to improve, develop, and renew SID is by developing SID as the resource center application or SID portal. *SID Berdaya* portal is aimed as the center of service and knowledge about *SID Berdaya* for any village/district government who want to access *SID Berdaya*. On the other hand, SID is also assisted by some institution such as government institution, NGO, and/or universities in implementing SID to a village. These institutions will be managed and served through *SID Berdaya* portal.

5. Establishing Regulatory Directory Information System

The needs of digital directory that contain the information on regulations regarding our field of expertise is important. Therefore, we tried by making an information retrieval system as the directory. This directory was made as a system to store, download, and maintain

Lembaga pengguna adalah pemerintah desa/kelurahan yang menggunakan SID Berdaya. Sementara lembaga pendamping adalah instansi pemerintah/OPD, LSM/NGO, dan/atau perguruan tinggi yang memiliki program pendampingan penerapan SID Berdaya di suatu desa atau daerah. Kedua kategori lembaga ini akan dikelola atau dilayani melalui portal SID Berdaya.

information. The system does not only able to store any information on regulations but also display the connection between the products of law. The products will become the reference for CRI's work program in analyzing an issue.



Tampilan laman SIKAB (sikab.gunungkidulkab.go.id)

Display of the SIKAB website page (sikab.gunungkidulkab.go.id)

5. Pembuatan Sistem Informasi Direktori Regulasi

Kebutuhan direktori digital yang menampung informasi peraturan perundang-undangan/regulasi terkait dengan bidang kerja yang kami geluti menjadi kebutuhan bagi kami. Atas dasar itu, kami mencoba membuat direktori yang bersifat *information retrieval system*. Direktori tersebut dibuat sebagai sistem yang mampu menyimpan, mengambil dan memelihara informasi. Sistem ini tidak hanya mampu menyimpan direktori peraturan perundang-undangan, tetapi juga bisa menampilkan keterkaitan antarproduk hukum. Hal tersebut menjadi rujukan untuk analisis isu yang menjadi fokus kerja CRI.

SEKILAS TENTANG SIKAB

Aplikasi Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) merupakan bagian dari prakarsa pengembangan seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas di tingkat kabupaten. SIKAB merupakan perwujudan sistem agregasi data dari sistem informasi desa di tingkat kabupaten.

FUNGSI

- Menghimpun data-data dari Sistem Informasi Desa (SID) ke tingkat kabupaten
- Menjamin sinergitas data dan program antara pemerintah desa dan pemerintah daerah
- Menjadi sistem kontrol oleh pemerintah desa dan juga publik atas data-data desa yang digunakan oleh pemerintah kabupaten

IMPLEMENTASI

Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang berhasil menghubungkan pemanfaatan basis data SID seluruh desa dengan SIKAB di tingkat kabupaten. Pada 25 April 2017 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meluncurkan SIKAB GUMREGAH. Prakarsa ini merupakan kolaborasi antara CRI dan Pemerintah Kabupaten Guningkidul.

KRONOLOGI

2013 - 2015

Riset oleh internal CRI mengenai analisis kebutuhan dan rancangan prototype/purwarupa sistem

2016 - 2017

Prototype/purwarupa SIKAB siap diujicoba. Proses ujicoba SIKAB di Kabupaten Gunungkidul, sebagai bagian dari program pemutakhiran Basis Data Terpadu pada 2016

25 April 2017

SIKAB di Kabupaten Gunungkidul resmi diluncurkan dengan nama SIKAB GUMREGAH

2017 - 2018

Pendampingan pemanfaatan SIKAB di Kabupaten Gunungkidul. Analisis kebutuhan integrasi SIKAB dengan data/informasi pembangunan di tingkat daerah bersama BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

TAUTAN APLIKASI

<https://sikab.gunungkidulkab.go.id/> --> konteks penerapan di Kabupaten Gunungkidul

CRI memberlakukan syarat ketat dalam penerapan SIKAB di suatu daerah. Penerapan SIKAB hanya dilakukan di wilayah kabupaten yang telah menjalankan SID Berdaya secara utuh di seluruh desa.

Pemerintah kabupaten setempat juga wajib memiliki peta jalan pengembangan dan pemanfaatan SID, lengkap dengan skema koordinasi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pihak.



Penguatan Kapasitas

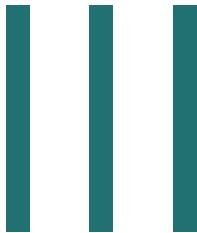
Capacity Building

A

Penguatan Kapasitas Eksternal

External Capacity Empowerment

	1.	2.
Penguatan Kapasitas Eksternal	Diskusi eksternal External discussion	Pelatihan jurnalistik untuk media komunitas Journalistic training for community media
	3.	4.
External Capacity Empowerment	Pelatihan website desa Website training	Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) SID training
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan SID tingkat dasar untuk 10 desa di Kabupaten Pacitan Basic SID training for 10 villages in Pacitan regency b. Pelatihan SID untuk olah Basis Data Terpadu di Kabupaten Pacitan SID training for Integrated Data Base in Pacitan Regency c. Training of Trainer Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan Training of Trainer for Regional Agency Organization in Pacitan Regency d. Pelatihan SID untuk instrumen data disabilitas di Gunungkidul SID training for collecting the data on disability in Gungkidul e. Pelatihan SID tingkat desa di Kabupaten Kebumen SID training for village level in Kebumen Regency f. Lokakarya SID di Kabupaten Temanggung SID workshop in Temanggung Regency g. Pelatihan SID untuk olah Basis Data Terpadu di Kabupaten Lombok Utara SID training for Integrated Data Base in North Lombok Regency

**B****Penguatan
Kapasitas
Internal****Internal Capacity
Empowerment**

1.

Pengembangan
Ekonomi Kreatif
*Creative economy
development*

2.

Pelatihan Keamanan
Digital
Digital security training

3.

Pelatihan Photo Story
Photo story training

4.

Lokalatih Mobilisasi
SDO Organisasi
Masyarakat Sipil
*SDO mobilization
training for civil
organization*

Menginisiasi ruang-ruang belajar menjadi salah satu upaya kami untuk meningkatkan kapasitas warga dalam mengelola data dan informasi. Ruang-ruang belajar itu tidak hanya menjadi wadah untuk menguasai cara menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mengelola data dan informasi di lingkungannya, tetapi juga memahami konteks penggunaan TIK itu dalam pengelolaan data dan informasi. Bagi kami, pemahaman tentang konteks sama pentingnya dengan kemampuan teknis dalam mengoperasikan TIK. Keduanya harus berjalan seimbang dan saling mengisi. Sepanjang 2017, kami berupaya membuka ruang-ruang belajar semacam itu supaya warga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai pengelolaan data dan informasi berbasis TIK sehingga dapat menerapkannya untuk kebutuhan masing-masing.

Initiating learning space is one of our effort to improve the people's capacity to organize data and information. The spaces do not only serve as a platform for the people to master the use of information and communication technology (ICT) in organizing data and information, but also to understand the context of ICT utilization. For us, understanding the context is equally important to the technical knowledge in operating ICT. In other word, both of them have to be aligned. Over the course of 2017, we were opening the learning spaces in order to enable the people with intact understanding regarding the ICT-based data and information management. Therefore, they can put everything they learn into use in the future.

A. Penguatan Kapasitas Eksternal

1. Diskusi eksternal

Pengembangan media komunitas yang merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan informasi berbasis komunitas merupakan salah satu isu yang sejak dulu menjadi fokus CRI. Sejumlah diskusi mengenai media komunitas pun diselenggarakan sepanjang tahun 2017. Diskusi semacam ini tidak hanya menjadi ruang bagi CRI untuk merefleksikan berbagai praktik pengembangan media komunitas yang sudah dilakukan, namun juga untuk menyemai ide terkait pengembangkan media komunitas ke depan. Selain itu, diskusi-diskusi yang melibatkan berbagai pihak juga diharapkan bisa merangkul lebih banyak pihak untuk mengembangkan media komunitas.

Untuk mengawalinya, CRI menyelenggarakan diskusi bertajuk “Menggagas Konten Media Komunitas” pada 23 Mei 2017 dengan menghadirkan Tomi Wibisono (Pemimpin Redaksi WARNING! Magazine), Muna Khoirul (Pegiat Media komunitas MGM FM Borobudur), dan Budi Dharmawan (Fotografer) sebagai narasumber.

Diskusi ini diadakan untuk menggali berbagai model praktik produksi informasi yang bisa dikembangkan dalam media komunitas. Dalam diskusi tersebut, Budi menjelaskan mengenai peran foto cerita yang dapat diimplementasikan

A. External Capacity Empowerment

1. External discussion

The community media empowerment is one of the community-based information management. It is one of the issues that has been the main focus of CRI ever since. Several discussions on community media were held during 2017. The discussions did not only become the room for CRI to evaluate the current practice of community media empowerment, but also to find new idea for future empowerment. Moreover, the discussions involved many parties who were expected to embrace more people in empowering community media.

As the start, CRI held a discussion titled “Initiating Content for Community Media” on 23 May 2017 by featuring Tomi Wibisono (Editor in Chief of WARNING! Magazine), Muna Khoirul (activists of MGM FM Borobudur Community Media), and Budi Dharmawan (Photographer) as speakers.

The discussion managed to facilitate the audience to learn more about various model of information production practice that can be implemented into community media. In the discussion, Budi explained the role of photo story in producing information. On the other hand, Tomi explained the zine created and published by punk community to express their idea. Muna also explained about the practice of community radio management conducted by MGM FM.



dalam media komunitas. Adapun Tomi menjelaskan tentang zine yang dibuat oleh komunitas punk untuk menyuarakan ide-ide atau gagasan mereka. Sementara Muna menjelaskan praktik pengelolaan radio komunitas MGM FM yang telah dilakukannya selama ini. Melalui diskusi ini, berbagai pihak dapat belajar bersama-sama dalam mengembangkan media komunitasnya masing-masing.

Diskusi bertajuk "Menggagas Konten Media Komunitas" pada 23 Mei 2017 bersama Tomi Wibisono (Pemimpin Redaksi WARNING! Magazine), Muna Khoirul (Pegiat Media komunitas MGM FM Borobudur), dan Budi Dharmawan (Fotografer).

The discussion entitled "Initiating Community Media Content" on May 23, 2017 with Tomi Wibisono (Editor-in-Chief of WARNING! Magazine), Muna Khoirul (Community Media activist at MGM FM Borobudur), and Budi Dharmawan (Photographer).

2. Pelatihan Jurnalistik untuk Media Komunitas

Salah satu upaya pengembangan media komunitas selama ini dilakukan melalui pelatihan jurnalistik bagi pegiat media komunitas. Kali ini, atas undangan dari LSM Paluma Nusantara, CRI mengisi pelatihan media warga di Desa Sidamulih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (26/3) hingga Senin (27/3) tersebut dihadiri oleh 21 orang peserta dari Desa Sidamulih dan Desa Bangunsari. Selama dua hari, para peserta mendapatkan materi terkait pengertian dan urgensi pendirian media warga, kaidah-kaidah jurnalistik, serta praktik penulisan dan peliputan. Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong para peserta jadi penggerak media komunitas di desanya masing-masing.

3. Pelatihan website desa

Pada 2016, CRI diminta menjadi narasumber dalam pelatihan *website* desa berjudul "Penerapan Pengembangan Sistem Informasi Desa (*Website Desa*)" yang diadakan Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pelatihan ini dilakukan sebanyak tiga kali untuk tiga angkatan yang berbeda. Angkatan pertama mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pada 22 – 24 September 2017 di Hotel Adhiwangsa Solo. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa di Kecamatan Kunduran dan Jiken. Pelatihan untuk angkatan kedua yang diadakan pada 29 September – 1 Oktober 2017 diikuti

2. Journalistic training for community media

Journalistic training is one of our effort to empower the community media. In 2017, CRI was invited by an NGO named Paluma Nusantara to train the people of Sidamulih Village, Ciamis Regency, West Java. The training was held from 26 to 27 March 2017 attended by 21 participants from Sidamulih and Bangunsari Village. For two days, the participant learned about the understanding and urgency of community media, principle of journalism, reporting and news writing. After the training, the participants were expected to become the driving agent of community media in their village.

3. Website training

In 2016, CRI was invited as the speaker in a website training titled "The Implementation of Village Information System Development". It was held by the government of Blora Regency, West Java in three different periods. The first period was held from 22 to 24 September 2017 at Adhiwangsa Hotel, Solo and attended by the village apparatus from Kunduran and Jiken District. The second period was held from 29 September to 1 October 2017 and was attended by the village apparatus from Ngawen and Kedungtuban District. The third period was held from 6 to 8 October 2017 and attended by the village apparatus from Cepu and Kradenan District.

perangkat desa di Kecamatan Ngawen dan Kedungtuban. Adapun pelatihan untuk angkatan ketiga yang dilaksanakan pada 6 – 8 Oktober 2017 diikuti perangkat desa dari Kecamatan Cepu dan Kradenan.

Sebenarnya, pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang penerapan prakarsa SID di Kabupaten Blora. Sebab, *website* desa menjadi pintu masuk untuk mengenal aspek pengelolaan informasi dalam SID. Materi yang diberikan kepada peserta di tiga angkatan pelatihan tersebut difokuskan pada keterbukaan informasi publik di desa. Selain diajak memahami kewajiban desa sebagai badan publik untuk menerapkan keterbukaan informasi, peserta juga diberi materi tentang bagaimana cara mengelola informasi publik yang dimulai dari memetakan informasi publik di desa, memetakan jenis media di desa hingga mempelajari teknik penulisan supaya bisa mempublikasikan informasi publik di *website* desa masing-masing.

4. Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID)

Sebagai bagian dari upaya mengembangkan SID, CRI rutin menggelar pelatihan maupun menerima undangan mengisi pelatihan di sejumlah daerah. Selain untuk membagikan ide tentang prakarsa SID, agenda pelatihan semacam itu juga digunakan untuk mencari model pemanfaatan SID secara utuh. Hasil dari seri pelatihan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi prakarsa SID yang telah dirintis CRI sejak 2009.

The training aimed to provide the understanding about village information system (SID) initiative in Blora Regency. It is because the village website can become the portal to learn the information management aspect of SID. The training material given to the participants was focused on the openness of public information in a village. They also learn about article writing in the management and organization of public information. Therefore, they can find the media format that suits their village and publish articles in their website.

4. SID (Village Information System) training

In order to develop SID, CRI routinely holds its own training or invited as speakers in many trainings held in many cities and regencies. The trainings are not only to share the idea of SID initiative, but also to find the model to implement SID entirely. The result of the trainings has been evaluated for SID initiative since 2009.

In 2017, CRI has provided SID trainings for village government throughout the country. A number of trainings were held through SID School (SSID) scheme as the fund raises for CRI. SSID emphasized the importance of participative learning based on the experience of rural issue activist. SSID training material was compiled and based on the needs of each village. In 2017, we collaborated with 6 regencies for the training, the regencies are: Pacitan, kebumen, Blora, and

Sepanjang 2017, CRI beberapa kali memberikan pelatihan SID untuk pemerintah desa di berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah pelatihan dilakukan melalui skema Sekolah Sistem Informasi Desa (SSID) yang merupakan program *fund raising* lembaga. Dalam SSID, ditekankan pembelajaran partisipatif berdasarkan pengalaman langsung dari para pegiat isu perdesaan. Materi yang diberikan dalam SSID disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa. Pada tahun 2017, kami berkolaborasi dengan enam kabupaten dalam pelatihan tersebut, yakni: Kabupaten Pacitan, Kebumen, Blora dan Temanggung di Provinsi Jawa Tengah, Gunungkidul di DI Yogyakarta serta Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat.

a. Pelatihan SID Tingkat Dasar untuk 10 Desa di Kabupaten Pacitan

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan dukungan dari KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) ini berlangsung pada 7 – 9 Februari 2017 di Kabupaten Pacitan. KOMPAK merupakan program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia dalam mendukung program pengentasan kemiskinan Pemerintah Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam hal ini, Kabupaten

Temanggung in Central Java, Gunungkidul in Special District of Yogayakarta, and North Lombok in West Nusa Tenggara.

a. Basic SID training for 10 villages in Pacitan Regency

The training was held by the government of Pacitan Regency, East Java and supported by KOMPAK from 7 to 9 February 2017. Kompak is a partnership program between the government of Indonesia and Australia in supporting the poverty eradication program in accordance to National Medium-Term Development Plan (RPJMN). In that sense, Pacitan Regency is under the area of KOMPAK implementation.

The training was attended by 10 villages. They were also planned to be the model of SID implementation in Pacitan Regency. The training was facilitated by CRI by using a syllabus compiled according to the standard made by SSID CRI. Each village sent two participants and each of them took two different classes. One learned two to operate the feature on SID and the other learned about the public information management mandated by the law on Public Information Openness.

Pacitan adalah salah satu wilayah program KOMPAK.

Setidaknya terdapat sepuluh desa yang mengikuti pelatihan tersebut. Kesepuluh desa tersebut dirancang untuk menjadi desa percontohan dalam penerapan SID di Kabupaten Pacitan. Pelatihan ini difasilitasi oleh CRI dan menggunakan silabus yang disusun sesuai standar SSID CRI. Setiap desa mengirimkan dua peserta dalam pelatihan tersebut. Satu peserta mengikuti kelas olah data untuk mempelajari pengoperasian beragam fitur dalam aplikasi SID, dan satu peserta lainnya berada di kelas olah informasi untuk mempelajari bagaimana desa mengelola informasi publik yang merupakan amanat dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Pelatihan SID untuk olah Basis Data Terpadu di Kabupaten Pacitan

Inisiatif pengembangan dan penerapan SID di Kabupaten Pacitan berlanjut dengan penyelenggaraan pelatihan olah Basis Data Terpadu (BDT). Kegiatan pelatihan tersebut diselenggarakan pada 1 – 4 Mei 2017 di Kompleks Kantor Bupati Pacitan. Pelatihan ini merupakan kerja sama antara KOMPAK, Pemerintah Kabupaten Pacitan dan CRI. Ketiga pihak sepakat



Para peserta Training of Trainers SID dari Kabupaten Pacitan melakukan kunjungan ke Desa Nglegi, Gunungkidul, untuk melihat bagaimana SID diterapkan.

The SID Trainning of Trainers participants from Pacitan District visited Nglegi Village, Gunungkidul, to see and learn how the SID is applied.

b. SID Training for Integrated Data Base in Pacitan Regency

The initiative of SID development and implementation in Pacitan Regency was continued by holding an Integrated Data Base (BDT) training. The training took place at the Regent Office from 1 to 4 May 2017 by cooperating with KOMPAK, the government of Pacitan Regency and CRI. These parties agreed to organize another training for 10 villages assisted by KOMPAK

menyelenggarakan pelatihan untuk sepuluh desa dampingan KOMPAK dan lima desa dampingan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Sepuluh desa yang didampingi KOMPAK tersebut meliputi Desa Bubakan, Desa Bugur, Desa Jetak, Desa Ketro, Desa Ngumbul, Desa Wonoanti di Kecamatan Tulakan, serta Desa Gemaharjo, Desa Pucangombo, Desa Tahunan, Desa Tegalombo di Kecamatan Tegalombo. Kesepuluh desa dampingan program KOMPAK di Kabupaten Pacitan tersebut merupakan desa rintisan dalam upaya membangun model skema program penanggulangan kemiskinan yang terhubung dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Kesepuluh desa tersebut juga sebelumnya telah mengikuti pelatihan SID tingkat dasar pada Februari 2017 yang difasilitasi oleh CRI.

Adapun Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan dibantu oleh program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa dari perguruan tinggi juga melakukan pelatihan dasar di lima desa lainnya. Ke-15 desa itu diarahkan untuk mempelajari fungsi-fungsi olah data dalam aplikasi SID untuk kebutuhan olah BDT yang sudah disiapkan untuk setiap desa. Olah BDT dengan SID ini merupakan upaya untuk memaksimalkan manfaat penerapan SID dalam perencanaan dan pembangunan di tingkat desa maupun kabupaten.

and another 5 assisted by the government of Pacitan Regency.

Ten villages assisted by KOMPAK were Bubakan Village, Bugur Village, Jetak Village, Ketro Village, Ngumbul village, Wonoanti Village from Tulakan District, Gemaharjo Village, Pucangombo Village, Tahunan Village, Tegalombo Village from Tegalombo District. These villages were the pioneer in developing the program scheme to eradicate poverty in the level of village, district, and regency. They also partook in previous SID basic training in February 2017.

Moreover, the government of Pacitan Regency was assisted by a community service program group from a university to conduct basic trainings in other villages. 15 of the villages were taught to learn the function of data management on SID application in order to manage the BDT prepared by each village. BDT and SID management are the effort to optimize the implementation of SID in planning and empowering the people in the level of village and regency.

c. ***Training of Trainer Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan***

Pelatihan untuk para pelatih ini merupakan skema dari SSID angkatan VI. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan adanya pihak yang mampu memfasilitasi aparat desa, kecamatan mapun kabupaten agar dapat memahami dan memiliki kemampuan teknis dasar penerapan SID. Sebelumnya, mereka telah mengikuti dua seri pelatihan SID, yakni pelatihan tingkat dasar dan olah Basis Data Terpadu yang difasilitasi CRI pada Februari dan Mei 2017. Supaya bisa menyebarluaskan konsep SID ke desa yang lain, mereka tidak hanya dilatih untuk memahami SID tetapi juga dapat menjadi fasilitator dalam penyebarluasan SID.

SSID untuk para calon pelatih tersebut dilakukan pada 07 – 10 November 2017 di CRI. Total peserta yang hadir 19 orang, terdiri dari 12 peserta di Kelas Olah Data dan tujuh peserta di Kelas Olah Informasi. Dalam pelatihan SSID ini, peserta dibekali pemahaman tentang konsep SID secara utuh dan teknik fasilitasi. Melalui agenda tersebut, peserta disiapkan untuk menjadi fasilitator SID di tingkat kecamatan sehingga program penyebarluasan konsep SID ke 166 desa di kabupaten Pacitan diharapkan bisa lebih cepat terealisasi.

c. ***Training for Trainer for Regional Agency Organization in Pacitan Regency***

The training for trainer is part of the fourth SID Alumni scheme. The program was held to comply the needs of trainer to facilitate the village apparatus from any district or regency by providing the trainer with basic SID implementation sill. Prior to the training, they have participated in two different series of SID training: the basic training and BDT training facilitated by CRI in February and May 2017. By training the trainers, they were expected to not only understand SID but also to be the facilitator in distributing SID.

The training for trainer was held from 7 to 10 November 2017 in CRI and was attended by 19 participants. 12 of them were from the BDT training and 7 of them from the Information Management training. In the training, the participants were provided with the holistic and technical understanding of SID concept. Therefore, the participants will be prepared to become SID facilitators in district level and deploy the concept of SID to 166 villages in Pacitan in the future.

d. Pelatihan SID untuk Pendataan Disabilitas di Kabupaten Gunungkidul

Pada 2017, SID sudah dapat digunakan oleh seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, yang berjumlah 144. Tidak hanya digunakan secara *offline*, SID di Gunungkidul juga dapat diakses secara *online*. Tahapan selanjutnya dari penerapan SID itu adalah memaksimalkan manfaat SID untuk berbagai kebutuhan yang terkait dengan data dan informasi di desa.

Dalam konteks itu, salah satu hal yang digagas adalah pemanfaatan SID untuk olah data disabilitas.

Bekerja sama dengan UCP Roda untuk Kemanusiaan (UCPRUK) dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum), CRI memberikan pelatihan pendataan disabilitas di delapan desa percontohan di Kabupaten Gunungkidul pada 14 Agustus 2017. Program percontohan ini dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul sebagai OPD yang bertugas mengatur integrasi program-program sektoral dengan para pihak di tingkat Kabupaten.

Setiap desa mengirimkan satu perwakilan dalam pelatihan tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk menerapkan metode

d. SID training for collecting the data on disability in Gunungkidul

In 2017, SID became operational and accessible both online and offline in 144 villages in Gunungkidul Regency. Then, the utilization of SID will be optimized to meet the needs of data and information in the village.

In that context, an initiative was taken by utilizing SID to manage the data of people with disability. By cooperating with UCP Wheel for Humanity (UCPRUK) and the YAKKUM Rehabilitation Center (Christian Foundation for Public Health), CRI provided a training on 14 August 2017 in Gunungkidul. The program was coordinated by the Development Planning Agency (Bappeda) of Gunungkidul Regency as Local Goverment Working Unit (OPD) to handle the integration of sectoral programs with other parties in regency level.

Each village delegated one participant for the training. The training aimed to apply the input operation method and the data management on people with disabilities. The data collection was made mandatory in order to accurately figure out the number and location of the people with disabilities. There, the fair infrastructure development

operasional input dan olah data disabilitas. Pendataan warga penyandang disabilitas ini wajib dilakukan untuk mengetahui jumlah dan keberadaannya secara akurat. Pendataan yang tepat dapat membantu perencanaan dan realisasi pembangunan yang adil dan mampu mengakomodasi hak seluruh warga masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

e. Pelatihan SID Tingkat Desa di Kabupaten Kebumen

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah berupaya menerapkan SID. Transparansi dan partisipasi menjadi prinsip utama sistem pengelolaan data untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Sebagai salah satu upaya untuk membantu mewujudkan hal tersebut, CRI bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Kebumen serta Formasi memberikan pelatihan SID tingkat dasar kepada sepuluh desa di Kabupaten Kebumen yang diharapkan menjadi *pilot project*.

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam dua seri pelatihan di Kompleks Benteng Van Der Wijk, Gombong. Seri pertama dilakukan pada 20 – 22 September 2017. Sementara seri

can be planned and realized to accommodate all citizen including those with disabilities.

e. SID training for village level in Kebumen Regency

In order to realize a good governance, the government of Kebumen Regency, West Java is in the process to implement SID. Transparency and people participation become the main key for the data management system. Therefore, CRI, Formasi, and the government of Kebumen Regency worked together to organize a basic SID training for ten villages in Kebumen. The training also aimed to become the pilot project for further development.

The training was held in two different session at Van Der Wijk Fortress Complex, Gombong. The first session was from 20 to 22 September and the second one was from 4-6 October 2017. Actually, Kebumen has been trying to implement SID since 2014. However, the implementation has not worked properly. So, the training also served as a re-training for 32 pilot villages.

kedua dilaksanakan pada 4 – 6 Oktober. Kegiatan itu berisikan pengenalan dan pelatihan SID yang meliputi tata kelola data dan informasi. Agenda tersebut dilakukan atas undangan dari Formasi. Kebumen telah mencoba menerapkan SID sejak 2014 tetapi masih belum berjalan optimal. Pelatihan ini adalah pelatihan ulang bagi 32 desa percontohan.

f. Lokakarya SID di Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Informasi Desa (SID) pada 17 Oktober 2017. Pelatihan ini ditujukan untuk 174 desa. CRI menjadi narasumber yang memaparkan konsep dasar dan prinsip-prinsip SID yang diusung oleh CRI, khususnya yang pernah dirintis bersama di Kabupaten Temanggung dan mulai berjalan di beberapa kabupaten lainnya.

Kabupaten Temanggung telah merintis prakarsa SID bersama CRI sejak tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Temanggung masih mencari skema pengelolaan prakarsa SID yang tepat. Lokakarya ini diharapkan bisa menjadi salah satu landasan untuk menata kembali visi dan strategi penerapan SID di Kabupaten Temanggung oleh Pemkab.

f. SID Workshop in Temanggung Regency

The government of Temanggung Regency, Central Java organized a technical training session (Bimtek) for SID on 17 October 2017. CRI was appointed as a speaker to train 174 villages by providing the basic concept and principle of SID compiled by CRI. Especially the concept and principle pioneered in Temanggung Regency and other regencies as well.

Temanggung Regency has been pioneering the initiation of SID since 2012. However, the government is still looking for the right scheme to organize the initiation of SID. So, the workshop was expected to become a stepping stone to reorganize a better vision and strategy to implement SID in Temanggung Regency.

g. SID Training for Integrated Data Base in North Lombok Regency

The initiation to develop and utilize SID in North Lombok Regency, West Nusa Tenggara has entered its fourth year. SID was first introduced to North Lombok Regency in 2013 through a program called ACCESS (Astralian Community Development and Civil Society Empowerment

g. Pelatihan SID untuk olah Basis Data Terpadu di Kabupaten Lombok Utara

Inisiatif pembangunan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat sudah memasuki akhir tahun keempat. Pengenalan SID di Kabupaten Lombok Utara bermula pada tahun 2013 melalui program ACCESS (*Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme*). Kemudian pada tahun 2014 dan 2015, CRI bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara melanjutkan inisiatif tersebut.

Pada mulanya, inisiatif SID dilakukan di sepuluh desa percontohan. Inisiatif tersebut kemudian berlanjut menjadi 33 desa pada Mei 2015. Hingga kini, inisiatif pembangunan dan pemanfaatan SID di Kabupaten Lombok Utara semakin berkembang, salah satunya dengan mulai diwujudkannya integrasi seluruh desa ke Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB). Arah pengembangan dan pemanfaatan SID di Kabupaten Lombok Utara tidak jauh berbeda dengan proses di Kabupaten Gunungkidul, yakni pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) yang akan dijadikan rujukan dalam program penanggulangan kemiskinan.

Scheme). In 2014 and 2015, CRI and Development Planning Agency of North Lombok Agency (Bappeda) worked together to continue the initiative.

In the beginning, SID was initiated in 10 pilot villages. Then, it was expanded into 33 villages in May 2015. Until now, the implementation and utilization of SID in North Lombok Regency is expanding. It can be seen from the integration of entire villages into Regency Information System (SIKAB). The direction of SID utilization in North Lombok is similar to Gunungkidul Regency. The Integrated Data Bases (BDT) will be updated so it can be the reference in eradicating poverty.

In order to realize this, CRI organized a SID training for 33 villages from 22-27 October 2017 so that they can learn better to manage BDT. The purpose of the training was to become the stepping stone to analyze the development of SIKAB and the achievement of the 33 villages in managing the basic population data prepared by Bappeda for each village. Moreover, the training also aimed to train the participants to master the basic BDT management and to become the space to formalize a strategic agreement for continuous

Untuk mewujudkan hal tersebut, CRI menyelenggarakan pelatihan SID untuk olah BDT bagi 33 desa pada 22-27 Oktober 2017. Pelatihan ini merupakan salah satu langkah awal dalam membangun analisis dan pengembangan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB). Pelatihan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana proses dan capaian seluruh 33desa dalam mengelola data dasar kependudukan dalam setahun terakhir (2016 – 2017). Peninjauan ini juga dilakukan untuk melihat kualitas BDT yang disiapkan oleh Bappeda untuk setiap desa. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan agar peserta dapat menguasai materi dalam pelatihan dasar pengolahan BDT. Penyelenggaraan pelatihan ini juga menjadi ruang untuk merumuskan kesepakatan strategi pendampingan dan pemantauan berkelanjutan terkait pemanfaatan SID di 33 desa tersebut, khususnya dalam pemanfaatan BDT untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.

assistance and supervision regarding the utilization of SID in the 33 villages,especially in utilizing BDT to support the poverty eradication program.



Kegiatan pelatihan SID di Kebumen ini merupakan satu dari dua seri (yang diselenggarakan pada September dan Oktober 2017) pelatihan dasar SID termasuk di dalamnya adalah tata kelola data dan infomasi.

2017 SID basic training in Kebumen is one of two training series which held on September and October. Information and data management is one of its training materials.

Untuk mewujudkan visi dan misi lembaga dan memberikan kontribusi nyata kepada warga, kami sadar bahwa kami pun perlu terus mengembangkan diri. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masing-masing staf menjadi kunci. Mulai 2017, kami semakin serius dalam mengembangkan kapasitas staf yang materinya disesuaikan dengan arah rencana strategis lembaga ke depan.

In order to realize CRI's vision and mission in actively contributing to the society, we realize that we need to empower our organization as well. Therefore, internal capacity empowerment is a must. From 2017, we began to seriously empower our staff's capacity in line with our future strategic plan.

B. Penguatan Kapasitas Internal

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Menciptakan dan mengelola sumber pendanaan mandiri merupakan salah satu cita-cita CRI yang mulai direalisasikan pada 2016. CRI mulai membangun desain pengalangan dana untuk mendukung kemandirian. Beberapa model yang sedang dirintis antara lain pengembangan Koperasi, *Training Center*, dan Sekolah Sistem Informasi Desa (SSID). Salah satu tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap donor, serta dalam jangka panjang lembaga mampu membiayai sebagian kebutuhan operasionalnya dari hasil unit usaha ini.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, kami mencoba menguatkan kapasitas dalam aspek pengembangan ekonomi kreatif dengan mengikuti beberapa pelatihan dan kunjungan belajar. Setidaknya, terdapat dua pelatihan dan dua kunjungan belajar yang kami lakukan selama 2017.

Kegiatan pelatihan pertama yang kami lakukan di tahun 2017 adalah penguatan kapasitas pengurus Koperasi Lumbung Swadaya (KLS). KLS didirikan pada Oktober 2016. Koperasi ini masih tergolong baru dengan pengurus yang memiliki sedikit pengetahuan mengenai pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memberikan pelatihan bagi pengurus demi keberlangsungan koperasi. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 09 dan 16 Mei 2017 dengan menghadirkan Yayasan Griya Mandiri

B. Internal Capacity Empowerment

1. Creative economy development

One of CRI's target in the future is to be financially independent. CRI has been realizing the plan since 2016 by creating some fund rising tools. Some of the plans are the empowerment of Cooperative, Training Center, and School of Village Information System (SSID). Therefore, the organization will not only rely on donor and able to support its operational needs in the long term.

In order to realize this plan, we have been trying to empower our capacity in creative economy aspect by joining some trainings and study visits. At least, we have participated in two training and study visits in 2017.

In 2017, we held an empowerment training for Koperasi Lumbung Swadaya/Self-help Barn Cooperative (KLS). KLS is relatively new since it was established in 2016. Furthermore, KLS does not have enough staff and skills to properly run itself. Therefore, on 9 and 16 May 2017, we organized an empowerment training by featuring *Yayasan Griya Mandiri* (YGM) as the facilitator. YGM was preferred by our organization since it is one of the foundations who have successfully turned its cooperatives, *Griya Mandiri Makmur Cooperative* (GMM) into a fundraising tool.

On the hand, we also attend a fundraising training held by USC Satunama from

(YGM) sebagai fasilitator. YGM dipilih karena merupakan salah satu yayasan yang berhasil menjadikan koperasi sebagai alat penggalangan dana, yakni Koperasi Griya Mandiri Makmur (GMM). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus koperasi.

Selain itu, kami juga mengikuti pelatihan *fundraising* yang diselenggarakan oleh USC Satunama pada 25-27 Juli 2017. Pelatihan tersebut mengambil tema “Operasi Senyap” yang pondasi utamanya adalah hubungan kekerabatan atau pertemanan (relasi).

Kami juga menyelenggarakan studi banding dengan melakukan dua kunjungan belajar ke beberapa lembaga, yakni Rifka Annisa dan KPRI EFKAGAMA. Kunjungan belajar ke Rifka Annisa dilaksanakan pada 05 Mei 2017. CRI dan Rifka Annisa memiliki latar belakang dan konsep yang sama dalam membangun penggalangan dana, yakni dengan membangun ruang pertemuan dan penginapan. Dalam kunjungan belajar ini, kami mempelajari pengelolaan sistem operasional dan keuangan serta mendapatkan referensi arsitek atau kontraktor pembangunan. Sementara itu, kunjungan belajar ke KPRI EFKAGAMA UGM kami lakukan pada 23 November 2017. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari tiga hal, yakni pengelolaan hak anggota (sisa hasil usaha dan jasa tabungan/simpanan), pengelolaan hak-hak penyerta modal (jasa/bagi hasil), dan terakhir adalah mekanisme rapat anggota tahunan (RAT).

2. Pelatihan Keamanan Digital

Seiring dengan fokus lembaga terhadap pengelolaan informasi dan data berbasis

25 to 27 July 2017. The training titled “*Operasi Senyap*” or “Silent Operation” which foundation is the relation between friend and acquaintances.

We also organized a comparative study by visiting two institutions, they were Rifka Annisa (NGO) and KPRI EFKAGAMA (cooperative). We visit Rifka Annisa on 5 May 2017. CRI and Rifka Annisa shares the same background and concept in fundraising: establishing meeting space and inn. During the visit, we learn the operational and financial system management and provided with some contacts of architects and contractors. On 23 November 2017, we visit KPRI EFKAGAMA UGM and managed to learn three things. They are the management of member's rights (profits remain and savings), management of capital providers (profit sharing), and annual member meeting (RAT).

2. Digital security training

CRI focuses itself in the management of community-based data and information. In that sense, the issue of digital security becomes our concern. Especially in the era of information and technology. Therefore, we attended several training on digital security. One of them was “Holistic Digital Security Training for Women Activists” held by Purplecode Collective. The training took place at Wisma PKBI Jakarta from 24 to 28 July 2017. The training provided the

komunitas, isu keamanan digital yang merebak seiring dengan perkembangan teknologi informasi menjadi perhatian kami. Oleh karena itu, kami berupaya meningkatkan kapasitas staf di isu tersebut dengan mengikuti sejumlah agenda pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan keamanan digital bertema "*Holistic Digital Security Training for Women Activists*" yang diadakan oleh kolektif Purplecode. Pelatihan ini berlangsung pada 24-28 Juli 2017 di Wisma PKBI Jakarta. Pelatihan ini mengajak peserta untuk melihat isu keamanan digital dari perspektif feminis. Materi pelatihan yang diberikan tidak hanya berguna bagi CRI dalam upaya memperdalam pengetahuan terkait isu-isu di seputar dunia digital, namun juga diharapkan bisa memperkaya perspektif CRI dalam mengembangkan instrumen maupun metode pengelolaan informasi dan sumber daya berbasis komunitas.

3. Pelatihan Photo Story

Keahlian fotografi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh staf, khususnya staf yang bertugas mengelola media lembaga. Kemampuan mengambil foto yang baik dapat menunjang kerja-kerja internal maupun eksternal. Hampir dalam setiap kegiatannya, staf CRI selalu memproduksi foto-foto untuk keperluan dokumentasi dan kampanye baik melalui media sosial maupun sejumlah laman yang dikelola lembaga. Namun, dari ribuan foto yang dikelola dalam myalbum.combine.or.id, sangat sedikit ditemukan foto yang memiliki benang merah untuk menghasilkan cerita secara utuh dan detail atau disebut

participant with knowledge to see the issue of digital security with feminist perspective. The lesson obtained in the training did not only enrich CRI with the knowledge in digital world but also expanded CRI's perspective in developing the instrument and management method of information and community-based resource.

3. Photo Story Training

Skill in photography is very important for the staffs our organization. Especially those who in charge of managing our media. Almost in every activity, CRI's staff is required to take photos for documentational and campaign-related purpose that would later be circulated through social media and websites. However, among thousands of photos taken by myalbum.combine.or.id, there are only few photos that can tell a story as a whole in a series of photo called photo story. The lack of photo story also becomes a problem for CRI when it comes to producing good content for documentation or campaign.

Therefore, we invited Budi Dharmawan, contributor of National Geographic as speaker in our photo story training for 5 days in August 2017. The training aimed to forge the skill of our staff so that they can take better photos and assemble them into a series of photo story. Therefore, the photos contained in our websites and social media can be better in telling a story as a whole.

foto cerita (*photo story*). Minimnya stok foto bercerita itu kerap kali menjadi kendala CRI saat akan memproduksi dokumentasi maupun kampanye yang memerlukan foto yang baik sebagai materi pendukungnya.

Mengacu pada kebutuhan peningkatan kemampuan fotografi bagi para staf tersebut, kami menggelar pelatihan tentang foto bercerita dengan mengundang Budi Dharmawan, fotografer kontributor National Geographic, sebagai narasumber. Pelatihan tersebut dilakukan selama lima hari dengan tujuan mengasah kemampuan peserta pelatihan tentang memproduksi foto, utamanya foto jurnalistik yang baik. Secara khusus, pelatihan ini memiliki tujuan untuk mengasah keterampilan peserta pelatihan tentang bagaimana mengelola beberapa foto yang memiliki benang merah sehingga menghasilkan cerita yang utuh dan detail. Pelatihan dilakukan sepanjang Agustus 2017.

4. Pelatihan Mobilisasi SDO Organisasi Masyarakat Sipil

Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas staf dalam menyiapkan organisasi yang mandiri dan berkelanjutan adalah dengan mengikuti "Lokalatih Mobilisasi Sumber Daya Organisasi Organisasi Masyarakat Sipil" yang diselenggarakan oleh Yayasan Penabulu. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Yogyakarta pada 10-13 Oktober 2017. Mobilisasi sumber daya organisasi (SDO) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut upaya perluasan sumber-sumber daya dan peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi.

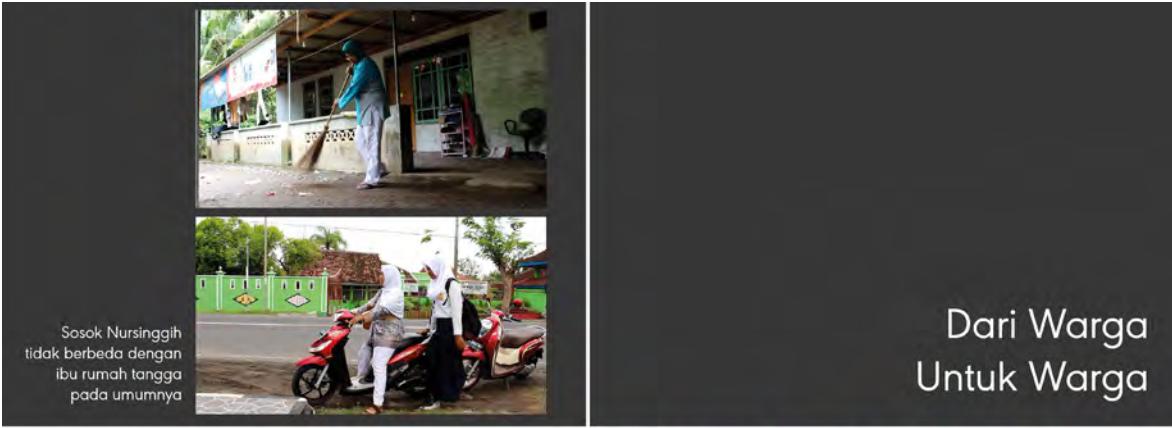
4. SDO Mobilization Training for Civil Organization

In order to empower our staff's capacity in preparing an independent and sustainable organization, we attended "Organization Resource (SDO) Mobilization Workshop for Civil Organization" held by Penabulu Foundation. The training was held from 10 to 13 October 2017. SDO is a term often used to address the effort to enhance the members skills, knowledge and capacity in managing the organization's resource.



Staf CRI mengikuti pelatihan fundraising yang diselenggarakan oleh USC Satunama pada 25-27 Juli 2017. Pelatihan tersebut mengambil tema "Operasi Senyap" yang pondasi utamanya adalah hubungan kekerabatan atau pertemanan (relasi).

CRI staff attended fundraising training organized by USC Satunama on July 25-27, 2017. The training took the theme of "Silent Operation" whose main foundation was kinship or friendship (relationship).



Dari Warga Untuk Warga



Salah satu potongan karya peserta pelatihan photo story. Karya ini mengambil tema peran perempuan dalam pembangunan di Desa Murtigading, Bantul.

One piece of the work of the photo story training participants. This work is picturing women's participation in the development of Murtigading Village, Bantul.



Capaian Mitra

Achievement of Our Partners

IV

1.

Peluncuran SIKAB di
Gunungkidul

SIKAB Launching
in Gunungkidul

2.

PPID Award 2017
Tingkat Provinsi untuk
Pemerintah Kabupaten
Pacitan dan Desa
Ngumbul

Provincial PPID
Award 2017 for the
government of Pacitan
Regency and Ngumbul
Village

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan salah satu gagasan yang pengimplementasiannya terus kami kembangkan sejak tahun 2009. Pengembangan SID merupakan salah satu program yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan sumber daya berbasis komunitas di tingkat desa. Selama kurang lebih delapan tahun kami telah bermitra dengan ribuan desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada 2017 lalu, beberapa mitra kami berhasil meraih sejumlah capaian yang layak dicatat.

Village Information System (SID) is one of our idea which implementation has been under development since 2009. Developing SID is one of the programs carried out gradually and continuously to support the community-based resource management in a village. For about 8 years we have been working together with thousands of villages as our partner throughout Indonesia. In 2017, some of partners attained several remarkable achievements.

1. Peluncuran SIKAB di Gunungkidul

Pada 25 April 2017, Kabupaten Gunungkidul yang menjadi salah satu mitra kami berhasil meluncurkan Sistem Informasi Kabupaten atau SIKAB. Peluncuran tersebut menandai terwujudnya integrasi data di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga data dari seluruh desa di Gunungkidul yang terekam di SID dapat diakses dan dipantau secara berkala melalui SIKAB.

Rencana pemanfaatan pertama adalah untuk menghimpun agregat Basis Data Terpadu (BDT) yang telah dimutakhirkan melalui SID oleh 144 desa. BDT digunakan sebagai tujuan pengambilan keputusan untuk program penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kabupaten Gunungkidul.

Data tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pihak dari tingkat desa hingga kabupaten untuk kebutuhan perencanaan atau pengambilan keputusan di wilayah atau sektornya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah seluruh elemen masyarakat perlu mengawal dan memastikan agar SID sepenuhnya digunakan untuk memenuhi hak sosial dasar dan digunakan untuk kepentingan warga.

1. SIKAB Launching in Gunungkidul

On 25th April 2017, Gunungkidul Regency became one of our partners who has successfully launched the Regency Information System (SIKAB). The launch marked the implementation of data integration system between a village and its regency. Therefore, the data from all the villages in Gunungkidul recorded on SID can be accessed and monitored periodically through SIKAB.

The first utilization plan is to gather the aggregate of Integrated Data Base (BDT) updated by 144 villages through SID. BDT is used as the goal of decision making for poverty reduction program coordinated by the Regional Poverty Reduction Coordination Team (TKPD) of Gunungkidul Regency.

It is expected that the data can be utilized by anyone in the village and regency for planning and decision making in their respective sector. For the next step, the whole elements of the community need to oversee and ensure the utilization of SID in order to fulfill the basic social right and interest of the people.



Peluncuran SIKAB GUMREGAH pada tanggal 25 April 2017 oleh Bupati Gunungkidul Hj Badingah di bangsal Sewokoprojo Wonosari Gunungkidul.

The launch of SIKAB GUMREGAH on April 25, 2017 by Hj Badingah, the Regent of Gunungkidul in the Ward of Sewokoprojo Wonosari Gunungkidul.

2. PPID Award 2017 Tingkat Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Desa Ngumbul

Salah satu mitra kami, yakni Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Desa Ngumbul di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan berhasil menyabet penghargaan dalam ajang "PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Award 2017". PPID Award 2017 ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) Badan Publik tingkat OPD dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada 18 Desember 2017.

Pemerintah Kabupaten Pacitan menyabet empat penghargaan dalam kategori sebagai berikut:

- Juara I kategori website terbaik kabupaten/kota se-Jawa Timur
- Juara II kategori kabupaten/kota kategori A dalam monitoring dan evaluasi pemeringkatan PPID 2017 terbaik.
- Juara I kategori transparansi anggaran kabupaten/kota terbaik
- Juara III kategori meja layanan informasi kabupaten/kota terbaik

Sementara itu, Pemerintah Desa Ngumbul di Kabupaten Pacitan mendapatkan Juara II dalam kategori kategori website desa terbaik.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pemerintah Desa Ngumpul

2. Provincial PPID Award 2017 for the Government of Pacitan Regency and Ngumbul Village

One of our partners, the Government of Pacitan Regency and Ngumbul Village in Tulakan sub-District managed to achieve a prestigious award in "PPID Award 2017". PPID Award 2017 was organized on 18 December 2017 by the Information Commission of East Java in monitoring and evaluating the public information service in Local Goverment Working Unit (OPD) level and Regency/City in the entire East Java.

The Government of Pacitan Regency's achievement in PPID Award 2017 were:

- First place in "best website in East Java" category
- Second place in "best PPID monitoring and evaluation-category A" category
- First place in "best budget transparency" category
- Third place in "best information service" category

Meanwhile, the Government of Ngumbul Village in Pacitan also won the second place "best website" category.

The achievement made by the Government of Pacitan Regency and Ngumpul Village shows that SID has been useful in rising the openness of public information. Ngumbul Village also proved that SID has become a good space to rise the village participation and transparency. So, as SID

menunjukkan bahwa SID berguna dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Desa Ngumbul telah berhasil memaknai bahwa SID merupakan ruang untuk meningkatkan transparasi dan partisipasi. Kami berharap, seiring dengan keberlanjutan program SID, semua mitra kami dapat mencontoh keberhasilan desa lain serta mengembangkan dan memanfaatkan SID dalam konteks yang lebih luas.

program continues, we hope that all of our partners can learn from the success of some villages and therefore improve and utilize SID in a bigger context.



The screenshot shows the official website of Desa Ngumbul. At the top, there is a navigation bar with links to Profil Desa, Pemerintahan Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Data Desa, and Kontak. Below the navigation bar, there are several small images illustrating various aspects of village life and governance. The main content area features a banner for the 'Desa Ngumbul Raih PPID Award 2017 Komisi Informasi Jatim'. This banner includes the date (13 Desember 2017) and time (05:40:00 WIB). To the right of the banner, there is a section titled 'Layanan Mandiri' (Self-service) which asks visitors to enter their NIK and PIN. Further down, there is an 'Agenda' section listing an event: 'Agenda Kegiatan Peringatan Hari Jadi Ke-273 Kabupaten Pacitan Tahun 2018 SELASA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2017 POSYANDU LANSIA DESA NGUMBUL BIMBINGAN TEKNIS KETRAMPILAN DAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN'.

Publikasi PPID Award 2017 di website Desa Ngumbul, Pacitan.

PPID Award 2017 publication on the Ngumbul Village website, Pacitan.

Lampiran

Appendix

Laporan Keuangan Financial Report

Combine Resource Institution 2017

Jenis	Pemasukan / Income	Pengeluaran/ Expenditure
Hibah Program / Grant Program	Rp 2,598,069,000	Rp 2,377,582,500
Jasa Konsultasi / Consulting Service	Rp 286,498,525	
Penggalangan Dana / Fundraising	Rp 22,464,300	
TOTAL	Rp 2,907,031,825	Rp 2,377,582,500

Dewan Pembina dan Staff

Boards and Staff

Dewan Pembina/Advisory Board:
Dodo Juliman

Dewan Pengawas/Supervisory Board:
Agustiawan Syahputra

Dewan Pelaksana/Executive Board:
Delima Kiswanti, Mulya Amri, Ahmad Nasir

Direktur/ Director: Imung Yunardi

**I. Unit Pengelolaan Sumber Daya Komunitas/
Community Based Resource Management Unit**
Manajer/Manager:
Elanto Wijoyono

Staf Unit Pengelolaan Sumber Daya Komunitas/
Staff of Community Based Resource Management Unit:
Irman Ariadi

Staf Pemanfaatan Sistem Informasi/
Information System Utilization Staff:
Muhammad Amrun

**II. Unit Pengelolaan Informasi Komunitas/
Community Based Information Management Unit**
Manajer/Manager:
Idha Saraswati

Koordinator Suara Warga/
Voice of Community Coordinator:
Ferdhi F. Putra

Tim Media/Media Team

Staf Pengelolaan Pengetahuan/
Knowledge Management Staff:
Maryani

Staf Publikasi/Publication Staff:
Apriliana Susanti

Staf Multimedia/Multimedia Staff:
Aris Harianto

III. Teknologi Informasi/Information Technology
Koordinator/ Coordinator:
Muhammad Kholilurrohman

Staf Pengembangan Sistem Informasi/
Information System Development Staff:
Rizka Himawan

Staf Pengelolaan Jaringan/
Network Management Staff:
Zani Noviansyah

IV. Unit Sekretariat/Secretariat Unit
Manajer/Manager: Mary T. Prestiningsih

Staf Pengembangan Ekonomi Kreatif/
Creative Economy Development Unit Staff:
Anton Hadiyanto

Staf Akuntansi/Accounting Staff:
Rita Oktavianti

Kasir/Cashier: Ulfah Hanani

Staf Administrasi/Administration staff:
Rani S Siregar

Staf Rumah Tangga/Household Staff:
Sarjiman

Penjaga Malam/Security staff:
Suris Meidianto

Mitra dan Jaringan

Partners and Networks

LEMBAGA LOKAL-NASIONAL/ LOCAL - NATIONAL ORGANIZATIONS

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
 Pusat Rehabilitasi YAKKUM
 KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan)
 Perkumpulan Paluma Nusantara
 Jaringan Radio Komunitas Indonesia
 Yakkum Emergency Unit (YEU)
 UCP - Roda untuk Kemanusiaan
 Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office
 Jaringan Perempuan Yogyakarta
 Kota Kita
 Penabulu
 Samdhana
 FORMASI
 LBH Pers Yogyakarta

LEMBAGA INTERNASIONAL/ INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Ford Foundation
 Radio FMYY Jepang
 AMARC Asia Pacific
 SEAPA
 Internews

PERGURUAN TINGGI/ UNIVERSITIES

Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
 Universitas Pembangunan Negara (UPN) Yogyakarta
 MMTC Yogyakarta
 Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

KOMUNITAS/ COMMUNITIES

Radio Komunitas Wijaya FM
 Radio Komunitas MGM Magelang
 Radio Komunitas Best FM
 Radio Komunitas Primadona
 Radio Komunitas Suandri FM
 Speaker Kampung
 WARNING Magz
 Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul (FKDG)
 TBM Kuncup Mekar
 Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) DIY

INSTITUSI PEMERINTAH/ GOVERNMENT INSTITUTIONS

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
 BAPPENAS
 Kementrian Komunikasi dan Informatika
 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 Pemerintah Kabupaten Bantul
 Pemerintah Kabupaten Temanggung
 Pemerintah Kabupaten Pacitan
 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

